SEJARAH GERAKAN DAKWAH
FRONT PEMBELA ISLAM KOTA PALEMBANG,
1999-2016

SKRIPSI

Diajukan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh:

Yusuf Yasin
NIM. 10420802

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2016

NOMOR : B- 530 /Un.09 /PP.01/06/ 2016

SKRIPSI

SEJARAH GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM KOTA PALEMBANG, 1999-2016

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

YUSUF YASIN
NIM 10420802

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Februari 2016

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Nor Huda, M. Ag., M. A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Sekretaris

Maryuzi,S.Ag
NIP. 19700901 200003 1 003

Pembimbing I

Dolla Sobari, M.Ag.
NIP. 19700121 200003 1 003

Penguji I

Dr. Nor Huda, M. Ag., M. A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Pembimbing II

Yazwardi, M.Ag.
NIP. 19710101 200003 1 006

Penguji II

Drs. Abdurrasyid, M.Ag.
NIP. 19670222 199403 1 003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)

Tanggal, ...

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

Dr. Nor Huda, M. Ag., M. A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Sejarah dan Kebudayaan Islam

Otoman,S.S., M.Hum
NIP. 19760516 200710 1 005

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, 25 Februari 2016

Yusuf Yasin

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk memulai pengantar ini selain puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat dan kekuatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun banyak halangan dan rintangan di dalam penulisan skripsi ini namun semua itu penulis jadikan sebagai pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan orang-orang yang mencintai mereka. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, baik itu dukungan materil maupun non materil.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang, bapak Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A selaku dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, bapak Otoman, S.S, M.Hum, selaku ketua program studi jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh program strata satu di universitas ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada bapak Yazwardi, M.Ag dan Dolla Sobari, M.Ag selaku pembimbing skripsi ini karena atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan, sehingga tulisan ini layak disebut sebagai skripsi. Kesediaan beliau menjadi pembimbing merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis. Dengan idealisme dan keilmuan yang dimiliki, pembimbing telah membaca, mengevaluasi dan banyak memberikan masukan pada penulisan ini. Hal yang sama juga disampaikan kepada bapak Drs. Masyhur, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, secara istimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Habib Mahdi Syahab dan Habib Umar Assegaf sebagai guru tercinta sekaligus

pengurus DPW FPI Sumatera Selatan, bapak Abdullah dan Bahrum, Lc yang telah banyak memberikan informasi terhadap tulisan ini.

Secara khusus, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, do'a serta ridhonya yang sangat banyak kepada penulis, keberhasilan ini juga berkat dukungan kakak, abang dan adik penulis. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada bapak Otoman, S.S, M.Hum yang telah memberikan rumusan untuk judul skripsi ini, juga kepada keluarga besar SKI A 2010 dan BSA 2010 yang telah mau berteman dengan penulis. Terkhusus untuk sahabat dekat yang telah memberikan semangat, ide dan bantuan dalam bentuk materil maupun non materil, mereka adalah Ahyani, Muhammad Daud, Muhammad Sholeh, Muhammad Amin Hidayatulloh, Irwansyah, Jefriadi, Isnayni Rahmawati, Balkis Kalama Jusi Masruroh, Siti Lestari, Desi Permata Sari, Imron, Imron TF dan seluruh keluarga besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang pada umumnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya sebagai manusia biasa, penulis menyadari skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena keterbatasan penulis dan atas semua kekurangan ini penulis bertanggung jawab penuh. Karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Palembang, 25 Februari 2016

Penulis,

Yusuf Yasin

INTISARI

Kajian Sejarah Islam
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Skripsi, 2016

Yusuf Yasin, **Sejarah Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang, 1999-2015**
xi + 94 hlm + lampiran

Penelitian ini mendeskripsikan tentang sejarah dan gerakan dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang dari tahun 1998-2016. Kerangka berpikir dari pokok permasalahan karena adanya kenyataan sosiologis yang perlu untuk dijelaskan oleh penulis secara lebih terinci yaitu, antara lain: [1] Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan Front Pembela Islam; [2] Apa saja gerakan dakwah Front Pembela Islam kota Palembang. Dengan metode sejarah melalui tahapan-tahapan normatifnya, seperti: *heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan histiografi*, dalam tulisan ini penulis akan mengungkapkan sejarah sebagai kajian sosial. Karena itu, pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, wawancara terbatas, dan observasi langsung terhadap data-data penunjang lainnya yang ditemukan pada saat penelitian. Analisis data diolah secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada logika induksi yang terdapat dalam kerangka teori, di mana pendekatan sosiologi juga menjadi instrument dalam penelitian ini.

Adapun objek sejarah yang diteliti adalah kapan berdiri dan perkembangan Front Pembela Islam di pusat, apa saja visi misi yang dijalankannya, serta bagaimana respon masayarakat sekitar dengan adanya gerakan-gerakan yang telah dijalankan oleh FPI pusat.

Selain FPI pusat penulis juga meneliti kapan berdirinya Front Pembela Islam di Kota Palembang serta apa saja gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan oleh Front Pembela Islam Kota Palembang. Penelitian ini menemukan fakta tentang sejarah dan gerakan dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang.

Terlepas dari kontroversi dan pandangan masyarakat umum tentang gerakan dakwah yang dilakukan oleh Front Pembela Islam Pusat maupun Front Pembela Islam Kota Palembang untuk untuk itu penulis akan mencari dan memaparkan apa

saja gerakan dakwah Front Pembela Islam di Kota Palembang melalui wawancara terbatas terhadap pengurus dan perwakilan masyarakat setempat.

Front Pembela Islam berdiri hanya empat bulan setelah presiden Soeharto lengser dari jabatannya dan di saat kemaksiatan sudah merajalela di ibukota Jakarta sehingga memberikan inspirasi bagi para ustad, habaib, dan para tokoh Jakarta dan sekitarnya untukmendirikan sebuah organisasi untuk membendung semua itu. Front Pembela Islam di Kota Palembang melakukan gerakan dakwah seperti mengadakan sunatan masal, membina para mualaf, menyediakan mobil ambulan gratis dan lain sebagainya. Sedangkan dalam gerakan *amar ma'ruf* yang dilakukan Front Pembela Islam adalah seperti majelis zikir, mengadakan istighozah, membuka majelis ta'lim, membuka pelatihan dakwah, menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Sedangkan dalam menjalankan gerakan *nahi munkar* yang dilakukan oleh organisasi ini adalah seperti menutup tempat perjudian, menutup tempat pelacuran, merazia minuman keras legal bila sudah ada perda nya dan juga merazia minuman keras ilegal, mencegah tumbuh dan berkembangnya aliran sesat seperti Ahmadiyah, Liberalisme dan seluruh aliran sesat lainnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
Pengesahan ..... **ii**
Pernyataan Keaslian ..... **iii**
Ucapan Terima Kasih ..... **iv**
Intisari ..... **vi**
Daftar Isi ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Devinisi Operasional 7
E. Tinjauan Pustaka 9
F. kerangka Teori 9
G. metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II DESKRIPSI FRONT PEMBELA ISLAM

A. Sejarah Front Pembela Islam 22
B. Asas-asas Perjuangan Front Pembela Islam 32
   a. Asas 33
   b. Visi Misi 34
   c. Pedoman 34
   d. Semboyan 34
   e. Motto 35
   f. Filsafat 35
   g. Doktrin 35

C. Struktur Oganisasi Front Pembela Islam 36
D. Mekanisme Prosedur Gerakan Standar Front Pembela Islam 45
a. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Syariat Islam 45
b. Pelaksanaan keputusan dengan menempuh prosedur hukum formal negara terlebih dahulu 46
c. Wilayah Aksi Amar Ma'ruf 47
d. Wilayah Aksi Nahi Munkar 47
e. Tertib Aksi Amar Ma'ruf 48
f. Tertib Aksi Nahi Munkar 49
g. Prosedur Menutup Tempat Maksiat Tanpa Izin Pemerintah 51
h. Prosedur Menutup Tempat Maksiat Yang Ada Izin Pemerintah .. 52
i. Prosedur Administratif 53
j. Prosedur Internal Menutup Tempat Maksiat 54
k. Larangan Dalam Prosedur Standar 54
l. Prosedur Membela Diri 54
m. Sanksi Pelanggaran Prosedur 55
n. Prosedur Menangani Resiko Aksi 55
o. Prosedur Memenuhi Permintaan Umat Dalam Menutup Tempat Maksiat 56

BAB III GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM KOTA PALEMBANG

A. Sekilas Tentang Kota Palembang 58
B. Front Pembela Islam Kota Palembang 63
C. Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang 66
D. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam Kota Palembang 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru memunculkan gerakan-gerakan sosial, politik dan keagamaan baru. Banyak organisasi sebagai wadah penyuaraan aspirasi. Munculnya gerakan secara massif itu dimungkinkan karena adanya respon sosial politik yang tertunda (*delayed responses*) terhadap sistem politik yang otoriter pada masa Orde Baru.[1]

Demikian juga pluralitas perkembangan faham gerakan Islam di Indonesia sesungguhnya telah terjadi sejak lama, sejak sebelum Indonesia merdeka, yang ditandai dengan hadirnya gerakan-gerakan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Sarikat Islam, Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad, Jong Islamited Bond, dan Ahmadiyah, di samping juga terdapat kelompok-kelompok umat Islam *kebanyakan (awam)* yang tidak ikut dalam berbagai hiruk pikuknya dinamika organisasi keislaman tersebut. Setelah Indonesia merdeka, muncullah partai-partai politik Islam, seperti Masyumi, PSII, Perti, NU, yang berbasis masa pada organisasi-organisasi Islam yang ada sebelumnya.[2]

---

[1] Jajang Jahroni dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13.

[2] Imam Tholkhah dan Neng Dara Affiah, *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru*, (Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI), h. 8-9.

Beberapa organisasi Islam di Indonesia telah memiliki andil yang cukup besar terhadap proses pengembangan Agama Islam. Termasuk dalam pembentukan budaya Islam dalam masyarakat luas. Peran tersebut berlangsung hingga sekarang, namun dalam perjuangan yang berbeda dengan pejuangan pada masa-masa awal bangsa ini menghadapi penjajahan.[3]

Telah banyak ormas Islam yang telah berdiri, baik itu pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan diantaranya organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan pada tanggal 25 Robi'uts Tsani 1419 Hijriyyah bertepatan dangan 17 Agustus 1998 Miladiyyah di Pondok Pesantren Al-Umm, di daerah Kampung Utan-Ciputat, di kediamanan KH. Misbachul Anam yang merupakan Sekjen Front Pembela Islam pertama. Pendeklarasian pendirian Front Pembela Islam dilakukan oleh sejumlah habib dan ulama serta ribuan umat Islam di Jakarta. Dideklarasikan sebagai wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* diseluruh sektor kehidupan. Karenanya, FPI harus peduli terhadap persoalan dakwah, harokah, aqidah, syariat, moral, sosial kemasyarakatan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, industri, politik, keamanan, pengetahuan dan teknologi serta sektor-sektor kehidupan umat manusia lainnya. Dari sini bisa dikatakan bahwa FPI sudah memposisikan diri sebagai organisasi *amar ma'ruf nahi munkar*.[4]

[3] Syamsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta : Amzah. 2010), h. 422.

[4] Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Dialog Front Pembela Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia,* (Jakarta: Ibnu Sidah, 2008), h.126-127.

FPI didirikan disaat merajalelanya kezholiman dan maraknya kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat di ibukota pada khususnya maupun daerah-daerah pada umumnya. Masa itu merupakan awal keruntuhan rezim Orde Baru yang telah terjadi kerusakan di mana-mana, sehingga harus ada dari sebagian umat ini yang tampil ke depan untuk melawan kezholiman dan memerangi segala kemungkaran, dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala malapetaka yang dapat menghancurkan negeri ini dengan segala isinya.

Di dalam Alquran Allah SWT berrfirman yang artinya, "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".[5] Ayat ini adalah salah satu alasan FPI menjadikan langkah perjuangannya sebagai ormas *amar ma'ruf nahi munkar.*

Esensi dari nama organisasi Front Pembela Islam mengacu pada maksud dan tujuan yang memiliki arti dari setiap kata Front Pembela Islam tersebut, esensinya adalah sebagai berikut. Disebut *front* karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih pada tindakan konkrit berupa aksi frontal yang nyata dan terang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian, diharapkan agar FPI senantiasa berada di baris terdepan untuk melawan dan memerangi kebathilan, baik dalam keadaan senang maupun susah.[6]

---

[5] QS. Ali-Imran, ayat 6.

[6] Al-Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Dialog Front Pembela Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, h. 127-128.

Disebut *pembela* dengan harapan agar senantiasa bersikap proaktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta dengannya diharapkan pula bisa menjadi pendorong agar tidak berpikir tentang apa yang bisa didapat, namun sebaliknya berpikir tentang apa yang bisa diberi. Dengan kata lain FPI harus siap melayani bukan dilayani.

Adapun kata *Islam* menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar lagi mulia. Jadi jelas, bahwa pemberian nama organisasi "Front Pembela Islam" adalah sebagai identitas perjuangan, yang dengan membaca dan mendengar namanya saja maka secara spontan bahwa organisasi ini siap berada di barisan terdepan untuk menegakkan syari'at Islam, sehingga identitas perjuangannya jelas dan mudah dipahami.

FPI juga banyak memiliki berbagai macam agenda di dalam gerakannya, baik itu di bidang dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, sosial, hukum, kesehatan dan lain sebagainya. Front Pembela Islam dalam menjalankan ideologinya memiliki beberapa kriteria yang di antaranya adalah, visi dan misi, filsafat, pedoman, semboyan, motto dan doktrin, di dalam setiap pergerakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh FPI. Jadi di dalam bertindak organisasi ini tidak gegabah di dalam setiap pergerakan yang akan dijalankan, FPI selalu berhati-hati di dalam setiap sekecil apapun semua pergerakan yang akan dijalankan dan lebih mengutamakan kelembutan yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan serta kesopanan dan toleransi. Namun,

apabila di saat melakukan semua aksi dengan cara kelembutan, kesopanan dan toleransi masih saja tidak bisa, maka FPI akan mengambil cara-cara yang tegas.[7]

FPI Kota Palembang dideklarasikan di daerah Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang adalah cabang pertama didirikannya organisasi FPI.

FPI Kota Palembang memiliki visi dan misi sama dengan FPI yang ada di pusat (Jakarta). Pada tahun 1998 yang mana terjadi huru hara yang menimpa kota Jakarta juga terjadi di kota Palembang, banyaknya aksi penjarahan, pemerkosaan pembakaran terhadap toko-toko orang Cina dan lain sebagainya yang menyebabkan keadaan kota Palembang saat itu sangat buruk. Untuk mengurangi dan memerangi aksi-aksi tersebut maka dari itulah FPI di kota Palembang didirikan.

FPI mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan di kota Palembang pada khususnya dikarenakan gerakan-gerakannya yang dikenal sangat tegas, seperti menswiping tempat-tempat perjudian, prostitusi dan berbagai tempat-tempat maksiat lainnya yang mana sebelum dilakukan tindakan-tindakan tegas FPI telah melakukan tindakan-tindakan yang telah dibenarkan oleh hukum negara, tindakan-tindakan tegas dan keras tersebut terjadi setelah tidak adanya respon postif dari pemerintah setempat. Oleh sebab itu FPI mengambil langkah-langkah tegas bersama masyarakat.[8]

[7] *Ibid.* h. 128.

[8] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi, Sekertaris FPI Kota Palembang, pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti dan memaparkan kapan berdirinya organisasi ini, apa saja kegiatan yang dilakukan dan bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap kehadiran organisasi yang menjadi kontroversi mulai tingkat pusat sampai ketingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan Front Pembela Islam ?
2. Apa saja gerakan dakwah Front Pembela Islam kota Palembang ?

Dari judul skripsi "Sejarah Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang." Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis akan memaparkan tulisan ini secara jelas, sehingga dapat diketahui oleh pembaca secara terperinci yang tidak menyebabkan tulisan ini menjadi kacau dan kabur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian penulis berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya Front Pembela Islam.
2. Untuk mengetahui kapan berdirinya Front Pembela Islam dan dalam bidang apa saja gerakan dakwah Front Pembela Islam kota Palembang.

Melihat dari tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang apa dan siapa itu Front Pembela Islam di Kota Palembang.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran terbuka tentang FPI atas kontroversi yang terjadi diberbagai kalangan.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu "Sejarah Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang, 1999-2015", maka penulis akan memaparkan sedikit gambaran tentang pembahasan dari tulisan ini.

Sejarah dapat diartikan sebagai asal-usul, atau kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan pengertian gerakan dakwah adalah kegiatan-kegiatan yang mengajak orang perorang, keluarga maupun masyarakat luas untuk berbuat yang baik dan benar.

Gerakan dapat diartikan sebagai peralihan tempat atau kedudukan baik itu hanya sekali ataupun berkali-kali.

Sedangkan dakwah secara secara bahasa adalah ajakan atau seruan, yaitu ajakan ke jalan Allah SWT. Seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat dan dakwah seharusnya berperan dalam pelaksanaan ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Secara istilah,

dakwah bermakna ajakan untuk memahami, mengimani dan mengamalkan ajaran Islam dan juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran (*amar ma'ruf nahyi munkar*).[9]

Jadi pengertian gerakan dakwah adalah orang-orang yang berpindah tempat dari tempat asal mereka menuju tempat orang lain baik itu jauh maupun dekat untuk mengajak orang lain memahami, mengimani ajaran Islam secara menyeluruh serta menyeru orang-orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari sebuah penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti dengan maksud untuk menghindari agar tidak terjadi duplikasi (plagiasi) penelitian.[10]

Untuk menunjang penelitian dan kesempurnaan skripsi ini penulis berusaha mencari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, website, dan wawancara yang berkaitan dengan judul ini sehingga penulisan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis.

Sejauh pengetahuan penulis bahwa pembahasan skripsi tentang Front Pembela Islam di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora belum ada yang mengangkat dan

[9] Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1988), h. 194.

[10] Fakultas Adab dan Humaniora, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, h.19

membahas tema Front Pembela Islam. Jadi inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang organisasi Front Pembela Islam.

F. Kerangka Teori

Untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori.

> "Menurut Max Weber organisasi birokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia hingga sampai pada sasarannnya. Berbicara soal birokrasi, konsep yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip "rasionalitas", yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi. Dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang "memaksimumkan efisiensi". Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi."[11]

Dalam suatu organisasi sosial mencerminkan pula suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Jadi organisasi sosial di samping sebagai suatu kondisi yang bersifat dinamis juga sebagai kondisi yang bersifat struktural.

Bentuk struktur organisasi merupakan tempat yang memungkinkan bagi pengembangan aktivitas manusia dengan berbagai aturan yang diakui bersama. Dikatakan demikian, oleh karena waktu, tempat dan keadaan tertentu dalam rangka memperdiksi tujuannya, sudah ditetapkan secara jelas dan diupayakan, setidaknya

[11] Muhammad Syawaluddin, *Resume Teori-teori Sosiologi*, (Program Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 22.

setiap anggota memahami tujuan organisasinya itu. Dalam organisasi sosial, anggota-anggotanya tersusun secara sistematis, masing-masing mempunyai status dan peranan-peranan yang bersifat formal, masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (umum). Dalam suatu organisasi, menurut J.O. Hertzler (1964) memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Harus ada ukuran yang tetap dalam tata-hubungan sosial yang dapat diterima oleh anggota kelompok (organisasi).
2. Harus ada kekuasaan atau otoritas yang mempunyai daya paksa dalam melaksanakan tata-hubungan sosial.
3. Adanya pengaturan dan penyusunan individu-individu dalam kelompok dan lapisan sosial tertentu yang menggambarkan adanya koordinasi dan sub-ordinasi.
4. Anggota-anggota yang hidup dalam berbagai bidang, dapat hidup dalam suasana harmoni, yang saling memberikan kepuasan.
5. Adanya tingkah laku yang merupakan standar itu disalurkan atau dipaksakan dengan mekanisme tekanan-tekanan sosial, menjadi suatu pola yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia.[12]

Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah sebuah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dipengaruhi sistem sosial

[12] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 116-117.

termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.[13]

Max Weber dalam teori konflik mengatakan konflik sebagai suatu sistem "otoritas" atau sistem "kekuasaan." Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu "kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan (pernyataan yang diakui keabsahannya)." Setiap organisasi di mana otoritas itu ada (yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi), dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik, karena mereka yang memegangnya untuk mempertahankan status quo.

Dalam telaah tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, digunakan istilah sistem sosial. Sistem sosial merupakan konsep yang paling umum dipakai oleh kalangan ahli sosiologi dalam mempelajari dan menjelaskan hubungan manusia dengan kelompok atau dalam organisasi sosial. Sama halnya dengan kesatuan komponen dalam pengertian sistem, kelompok masyarakat merupakan kesatuan utuh yang terdiri dari para individu sebagian yang berhubungan.[14]

Menurut Weber, tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Diakui bahwa orang pertama-tama ingin

---

[13] Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 114.

[14] Ida Bagus Irawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradikma: Fakta Sosial, Definisi sosial Dan Perilaku Sosial*, (Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 69.

mengamankan kehidupan materinya, akan tetapi ia juga memerlukan makna yang dapat diberikan kepada situasi hidupnya dan kepada pengalaman kehidupan yang konkret. Bagi siapaun yang menderita maka merasa perlu untuk memahami mengapa dirinya menderita, begitupun juga halnya bagi siapapun yang merasa bahagia, merasakan perlunya memberikan dasar pembenaran bagi kebahagiaannya itu.[15]

Menurut Lewis A. Coser, menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Lebih lanjut Coser menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu, kumpulan atau antara individu dan kumpulan.

Lewis A. Coser memahami konflik sebagai suatu yang inheren dalam sistem masyarakat, ini tak lepas dari fakta hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi dan diperebutkan. Fakta ini menciptakan *steering problem*. Baginya, konflik merupakan kondisi dominisi strukturtural, kelompok yang berada di dalam struktur dengan berbagai bentuk kebijakan dan aturan main di luar struktur wewenang tersebut.[16]

---

[15] *Ibid*. h. 71.

[16] Mohammad Syawaludin, *Memahami Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Konflik Lewis A. Coser*, dalam *Tamaddun Jurnal Sastra dan Kebudayaan Islam*, Fakultas Adab, No. 1/ Vol. XI (Januari-Juni 2011), h. 43.

Dalam hubungannya dengan sejarah Ibnu Khaldun (1332-1406 M) berpendapat dalam teorinya Progresif Linear yaitu gerak sejarah berdasarkan kehendak Tuhan, menurutnya bahwa seluruh peristiwa dalam panggung sejarah kemanusiaan adalah suatu garis-garis linear atau garis lurus yang naik dan meningkat ke arah kemajuan dan kesempurnaan (garis linear yang progres dan perfeksi) "Tuhan adalah pangkal penggerak sejarah". Menurutnya sejarah adalah kenyataan, dan tujuan sejarah agar manusia sadar akan perubahan-perubahan masyarakat sebagai usaha penyempurnaan perikehidupan.[17]

Teori yang digunakan untuk menunjang konsep sejarah dalam pendekatan terhadap masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini, Sejarah Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang, 1999-2015 bukan hanya menyangkut perkembangan pendidikan saja, tetapi juga institusi, ide-ide dan moral, agama, manusia dan kesemuanya dibahas secara genetik.[17]

Menurut Quraish Syihab metode dakwah ada dua macam :

1. Dakwah khusus, objek dakwah yang digunakan adalah *direct contact* (metode langsung) metode kontak langsung ini banyak digunakan. Metode ini bersifat *face to face relation*. Hal ini penting dan harus diingat dalam menggunakan metode ini adalah menentukan hal khusus yang hendak disampaikan kepada mayarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berpikir bahwa amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

[18] Endang Rochmiatun, *Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 29.

2. Metode dakwah *indirect contact* (metode tidak langsung), metode ini untuk memperluas sasaran media dan materi dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh media yang tersedia untuk dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, mulai dari media cetak, televisi, VCD, internet, selebaran-selebaran, pamphlet dan lain sebagainya.[18]

Umumnya teori-teori yang menjelaskan tentang fenomena gerakan Islam secara longgar dapat dikelompokkan kepada dua jenis. Pertama, teori-teori yang mencoba melihat fenomena gerakan ini sebagai kesinambungan sekaligus perubahan dalam sejarah Islam. Kedua, teori yang berusaha menjelaskan fenomena gerakan sebagai sebuah reaksi terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kaum muslimin diera modern.[19]

Berdasarkan syarat-syarat ini, maka nampak sekali adanya pola struktur yang ideal dalam suatu organisasi sosial, di mana sejumlah orang yang menjalankan suatu pekerjaan senantiasa dengan aksi telah direncanakan bersama. Dengan demikian organisasi adalah suatu proses sosial, di mana dalam pengaturan aktivitas-aktivitasnya secara berturut-turut sesuai dengan tujuan yang ditentukan bersama.

Pada penelitian ini, sejarah dan organisasi harus ada pola struktur yang ideal dan anggota-anggotanya tersusun (terstruktur) secara sistematis, masing-masing

[18] Quraish Syihab, *Membumukan Alquran Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1988), h. 187.

[19] Mujiburrahman, *Menakar Fundamentalisme Islam*, (Jakarta : Afkar, 2002), h. 77.

mempunyai status dan peranan-peranan yang bersifat formal, masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (umum).

Maka dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah teori-teori sejarah, organisasi, struktur sosial dan teori dakwah tersebut menurut penulis sangat relevan digunakan, karena mempunyai peranan yang penting terhadap terstrukturnya suatu organisasi sosial, akan mengalami perkembangan dan kemajuan.

G. Metode Penelitian

Dalam usaha menjawab permasalahan yang dikehendaki, maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang lazim juga disebut metode sejarah. Metode sejarah dalam pengertian yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari prespektif historis.

Pengertian yang lebih khusus, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Louis Gottschalk sebagaimana yang dikutip dari Dudung Abdurrahman menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.[20]

[20] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam,* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 103.

Berdasarkan pengertian di atas, para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti sejarah yaitu.

1. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan.
2. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian dari padanya) yang tidak otentik.
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik.
4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Istilah yang digunakan bagi keempat langkah itu berbeda-beda, tetapi makna serta maksudnya sama. Adapun langkah-langkah di dalam mensistematisasikan langkah-langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan data yang diteliti.[21] Sumber data yang digunakan meliputi dua sumber data yaitu:

a. Data primer, sumber lisan yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dan bersangkutan langsung dengan organisasi FPI, seperti pengurus, anggota, ketua FPI di Palembang dan simpatisan serta warga sekitar tentang tindak tanduk FPI di Palembang, data dari sumber ini diperoleh melalui wawancara.

[21] Sumardi Suryarata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 65.

b. Data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti literatur-literatur (buku-buku) atau hasil penelitian sebelumnya yang tertuang dalam tulisan.

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber melalui beberapa teknik yaitu:

a. Teknik dokumentasi, dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, dan gambaran atau arkeologis.[22] Dalam hal dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan mengunjungi markas atau rumah pengurus FPI di Palembang yang menyimpan dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini bertujuan untuk mencari kebenaran dari perjalanan sejarah pembentukan, dalam bidang apa saja gerakan dakwah FPI dan bagaimana dinamika dakwah yang dilakukan FPI di Palembang.
b. Teknik pengamatan (observasi). Penggunaan teknik observasi ini yaitu sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.
c. Teknik wawancara (interview) yaitu proses tanya-jawab antara dua orang atau lebih secara langsung dalam penelitian. Teknik ini berguna untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Selain itu, teknik wawancara berguna untuk merekonstruksi sejarah perkembangan FPI di

[22] Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah,* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 45.

Palembang dari sumber primer langsung. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pengurus.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap selanjutnya adalah kritik sumber atau verifikasi untuk memperoleh keabsahan sumber.[23]

Dalam hal ini, kritik sumber mempunyai dua kategori yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal merupakan suatu cara melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal pada dasarnya merupakan suatu penelitian atas asal-usul suatu sumber sejarah untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin ada dan untuk mengetahui apakah sumber sejarah yang dimaksudkan telah berubah dari isinya. Kemudian, kritik internal lebih menekankan pada aspek dari isi dari suatu sumber sejarah. Untuk mencapai maksud tersebut, maka harus melakukan dua penyelidikan, yaitu berkenaan dengan arti sebenarnya dari kesaksian dan kredibilitas saksi sejarah. Melalui kritik-kritik tersebut yang merupakan alat untuk mengecek atau kritik mengenai Sejarah FPI di Palembang.

3. Interpretasi

Setelah semua data dikritik maka data-data tersebut dirangkai agar mempunyai bentuk dan struktur. Pada langkah ini penulis menguraikan dan

[23] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 103.

mengembangkan data yang diperoleh kemudian memberikan penafsiran untuk merekonstruksi sejarah sehingga dapat dimengerti dan dipahami secara jelas.

Data yang telah diperoleh dari dokumentasi dan hasil observasi serta hasil wawancara, maka peneliti akan melakukan perbandingan dan menganalisis data tersebut supaya dapat melakukan rangkaian secara abstrak untuk membentuk struktur penulisan yang baik.[24]

Adapun analisis data adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk dipahami agar dapat dipersentasikan. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriftif. Metode ini juga digunakan agar lebih mudah digunakan untuk memperlihatkan langsung hubungan antara peneliti dan responden, agar lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola dan nilai-nilai.

4. Historiografi

Historiografi adalah fase terakhir dalam metode sejarah, yaitu cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.[25] Sebagai fase terakhir, maka penulis berusaha untuk menyajikan laporan atau hasil

[24] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, h. 105.
[25] *Ibid*. h. 116-117.

penelitiannya sebaik mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa yang dituangkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi karena bila pendekatan ini dipergunakan dalam gambaran tentang peristiwa masa lalu, tentu di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Konstruksi sejarah dengan pendekatan sosiologi itu bahkan dapat pula dikatakan sebagai sejarah sosial, karena pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, peranan dan status sosial, dan sebagainya.

Dengan menggunakan pendekatan sosial diharapkan dapat menemukan jawaban dari penelitian mengenai sejarah dan kajian mengenai kehidupan sosial disekitarnya. Pendekatan sosiologi itu sendiri adalah suatu landasan kajian sebuah penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.[26]

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan model penelitian kepustakaan dan lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam usaha untuk menjabarkan pembahasan skripsi ini, penulis mencoba memformulasikan dalam suatu sistematika penelitian sebagai berikut. Pertama pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latarbelakang masalah, tujuan dan kegunaan

[26] Lihat dalam *http://darniahbongas.Wordpress.com.*diakses pada Sabtu tanggal 4 Oktober 2014.

penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang dirumuskan di dalam bab I.

Sedangkan dalam pembahasan bab II adalah sebuah gambaran umum, berdirinya Front Pembela Islam, asas-asas Front Pembela Islam, struktur organisasi Front Pembela Islam dan, mekanisme prosedur standar gerakan Front Pembela Islam.

Sementara itu, bab III menguraikan tentang membahas sejarah dan kegiatan Front Pembela Islam di Kota Palembang, mengenal sekilas daerah Kota Palembang, Sejarah didirikannya Front Pembela Islam di Kota Palembang, kegiatan dakwah Front Pembela Islam dan kegiatan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Front Pembela Islam.

Semua pembahasan yang telah diuraikan dari keseluruhan bab tersebut dirumuskan tersendiri dalam bab IV sebagai penutup. Bab ini juga berisi simpulan dan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II
DESKRIPSI FRONT PEMBELA ISLAM DI INDONESIA

A. Sejarah Front Pembela Islam

Pada rezim Orde Baru, kritik yang dilontarkan kepada aparat pemerintah dan penegak hukum sering kurang diperhatikan atau kalaupun diperhatikan cenderung enggan untuk ditindak lanjuti. Partisipasi masyarakat dan tokohnya dalam mengatasi persoalan di masyarakat terkadang dimanipulasi demi kepentingan pemerintah, sehingga cepat atau lambat suatu kebijakan sering tidak mencapai sasarannya. Berbagai kebijakan yang diputuskan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat dan tokohnya, sama saja dengan menyimpan bom waktu yang pada suatu saat akan meledak hebat.

Tanda-tanda kearah itu telah terlihat di berbagai daerah, yaitu dengan munculnya gejala krisis kepercayaan masyarakat beserta tokohnya terhadap aparat pemerintah dan penegak hukum pada waktu itu (mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga tingkat pemerintah pusat). Hal ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum sehingga membuka pintu bagi sikap pesimisme dikalangan masyarakat yang kemudian mengarah pada tindakan-tindakan anarkis dan main hakim sendiri.[27]

Setelah kekuasaan Orde Baru jatuh dan muncul kekuasaan Orde Reformasi, sistem sosial dan politik mengalami perubahan yang semakin demokratis. Sistem asas

[27] Imam Tholkhah dan Neng Dara Affiah, *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru Upaya Merambah Dimensi Baru Islam,* (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), h. 175.

tunggal yang dikemas oleh Orde Baru ditiadakan dan sebagai gantinya adalah memberlakukan sistem asas pluralitas yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi perkembangan berbagai jenis gerakan sosial, politik dan keagamaan. Momentum inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong mencuatnya berbagai penganut faham keislaman, dengan berbagai nuansa radikal, sufistik dan liberal.[28]

Pada masa Orde Baru berbagai pendekatan telah digunakan untuk meredam kegiatan kelompok radikal, yang pada saat itu disebut sebagai gerakan ekstrim kiri (PKI) dan ekstrim kanan (Islam). Akan tetapi fokus pendekatan yang dilakukan untuk meredam berbagai gerakan kelompok radikal, baik kelompok radikal separatisme, marxisme dan kelompok radikal keagamaan (terutama Islam), adalah pendekatan yang bersifat militeristis dan terror mental, begitulah cara Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaannya dalam tiga dekade lebih.[29]

Selain karena alasan tersebut, bangkitnya Islam jenis ini juga didorong oleh suatu keinginan untuk menjaga dan mempertahankan martabat Islam dan sekaligus umat Islam. Umat Islam tampaknya selalu bernasib kurang baik, selalu menjadi korban dari tatanan sosial yang ada, untuk menjaga martabat dan wibawa Islam kelompok ini memandang perlu melakukan konsolidasi kekuatan Islam guna membela umat Islam yang diserang oleh kelompok lain. Atas dasar ini, lahirlah

[28] Lihat dalam http://tujuhkoto.wordpress.com.diakses pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2014.

[29] Imam Tholkhah dan Neng Dara Affiah, *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru Upaya Merambah Dimensi Baru Islam,* h. 59.

laskar-laskar Islam, laskar-laskar ini banyak melakukan pelatihan kemiliteran untuk memberi perlindungan kepada umat Islam di daerah-daerah konflik dan untuk memberantas kemaksiatan.

Di saat merajalelanya kejahatan di tengah-tengah masyarakat seperti membeludaknya VCD porno yang dijual dengan harga Rp. 2500 perkeping, perampokan, pencurian, pemerkosaan, penjarahan, beredarnya narkoba, miras yang dijual secara bebas dan tindak kriminal lainnya yang sangat merugikan masyarakat terutama umat Islam yang oleh karenanya telah terjadi kerusakan di mana-man bahkan telah mengundang berbagai musibah di seantero negeri. Sehingga tidak bisa tidak harus ada bagian dari umat ini yang sudi tampil ke depan untuk melawan kejahatan dan memerangi segala tindakan semena-mena dengan segala resiko perjuangannya, agar terhindar dari segala malapetaka yang bisa menghancurkan negeri dengan segala isinya, sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Allah di dalam Alquran pada surat Al-Imron : 104 yang artinya " *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"

Pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-53, sejumlah asatidz, kyai dan ulama, sebagian besar dari jabodetabek, berkumpul di Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperingati dan mensyukuri nikmatnya kemerdekaan sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari

ketidakadilan sampai dengan hak asasi manusia, di mana sebagian besar yang menjadi korban adalah umat Islam. Di antara mereka yang hadir adalah KH. Cecep Bustomi, Habib Idrus Jamalullail, KH. Damanhuri, Habib Muhammad Rizieq Syihab dan KH. Misbahul Anam, yang menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan inilah dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah yang bertujuan menampung aspirasi umat sekaligus mencarikan solusi terbaik atas persoalan-persoalan di atas, pertemuan ini adalah hari di mana FPI lahir.[30]

Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain :

1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.
2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan.
3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.[31]

[30] Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2004), h. 129-130.

[31] Lihat dalam http://www.yajri.or.id/news/opini/fpi-anarkis-benarkah-mengapa/. diakses pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015.

FPI merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. FPI termasuk salah satu kelompok Islam fundamentalis, jargon-jargon yang mereka pakai memang tidak jauh dari doktrin pembelaan kalimat Allah, lebih khusus lagi pemberlakuan syariat Islam dan penolokan mereka terhadap tata cara kehidupan barat yang bertentangan dengan syariat Islam bukan berarti anti terhadap orang barat, barang-barang dan teknologi dari barat.[32]

Kemunculan gerakan Islam radikal ini disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor internal dari dalam umat Islam itu sendiri. Faktor ini dilandasi oleh kondisi internal umat Islam sendiri telah terjadi penyimpangan norma-norma agama, yang kedua faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan rezim penguasa maupun hegemoni barat. Seperti di Ambon dan praktik kemaksiatan yang terjadi di masyarakat telah mendorong gerakan Islam bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik terhadap segala krisis. Pada gilirannya, radikalisme dijadikan sebagai jawaban atas lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan umat Islam.[33]

Pada awal berdirinya, FPI mengusung misi bahwa harus ada suatu gerakan yang terorganisir secara rapi dan terencana yang berani melawan praktek-praktek kemungkaran dan kema'siatan secara terang-terangan tanpa adanya rasa keraguan dan rasa takut untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak ada lagi

[32] Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 129.
[33] Khamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta, Teraju, 2002), h. 95-96.

kemaksiatan yang diberi izin atau minimal berkurangnya kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan.

Adapun struktur kepengurusan FPI pusat yang pertama adalah sebagai berikut:

1. Ketua Umum : Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, Lc, M.A.
2. Waketum : KH. Ja'far Shiddiq, S.PdI.
3. Sekretaris Umum : KH drs Misbahul Anam.
4. Bendahara Umum : Ust. Haris Ubaidillah, S.PdI.[34]

FPI di Kota Palembang didirikan hanya jeda waktu tiga bulan dari pendirian FPI pusat tepatnya adalah tanggal 17 November 1998, FPI Kota Palembang adalah cabang yang pertama kali didirikan di Indonesia. Menyangkut ideologi, visi-misi dan lain sebagainya FPI kota Palembang adalah sama dengan FPI pusat.

Sebelum didirikannya FPI di Kota Palembang telah lama terjadi berbagai kemaksiatan di Kota ini dan terlebih lagi sewaktu terjadinya reformasi tahun 1998 di kota Pempek ini pengrusakan, penjarahan, dan berbagai jenis kemaksiatan lainnya telah mncapai puncaknya. Dari kejadian ini maka sejumlah ulama, kyai, ustad dan tokoh masyarakat yang ada disekitar kota ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi yang secara tegas dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar, maka dipilihlah organisasi bernama Front Pembela Islam.

[34] Lihat dalam http://www.yajri.or.id/news/opini/fpi-anarkis-benarkah-mengapa/.diakses pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2015.

Adapun struktur kepengurusan FPI Kota Palembang yang pertama ialah sebagai berikut :

1. Ketua Umum : KH. Prof. Dr. Utsman Said.
2. Ketua Dewan Syuro : KH. Ali Umar Thoyib.
3. Sekretaris Umum : H. Muhammad. AZ.
4. Bendahara Umum : Drs. Zed. AR.[35]

Disebut *Front*, karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih pada tindakan konkrit berupa aksi frontal yang nyata dan terang-terangan dalam meneggakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga diharapkan agar FPI senantiasa berada dibaris terdepan untuk melawan dan memerangi kebathilan baik dalam keadaan senang maupun susah.

Disebut *Pembela* dengan harapan agar senantiasa bersikap proaktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta dengannya diharapkan pula bisa menjadi pendorong agar tidak berfikir tentang apa yang bisa didapat, namun sebaliknya berfikir tentang apa yang disa diberi, dengan kata lain FPI harus siap melayani bukan dilayani. Sikap seperti inilan yang diharapkan bisa menjadi penyubur keberanian dan pembangkit semangat berkorban dalam perjuangan FPI.

Adapun kata *Islam* menunjukkan perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar lagi mulia. Jadi jelas, bahwa pemberian nama organisasi Front

[35] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi, anggota FPI Kota Palembang, tgl 19 September 2014.

Pembela Islam adalah sebagai identitas perjuangan, yang dengan membaca dan mendengar namanya saja maka secara spontan organisasi ini siap berada di barisan terdepan untuk menegakkan syari'at Islam, sehingga identitas perjuangannya jelas dan mudah dipahami.

Dengan nama Front Pembela Islam, organisasi ini membela nilai dan ajaran, bukan orang, kelompok ataupun partai tertentu. Artinya, sebagaimana dikatakan Habib Rizieq, pendiri sekaligus imam besar FPI, sangat mungkin organisasi ini membela kelompok non muslim, karena menolong mereka adalah sebagian dari ajaran Islam, FPI seperti organisasi Islam lainnya memiliki corak karakteristik setidaknya terurai dalam tujuh sikap yaitu :

1. Berani dan tegas.
2. Semangat dan militan.
3. Sabar dan tabah.
4. Mandiri dan independen.
5. Substansial formalitas.
6. Kompromis dialogis.
7. Tradisional Moderat.[36]

Lambang organisasi FPI telah ditetapkan dan disepakati oleh petinggi FPI dalam musyawarah Nasional pertama pada periode kebangkitan pada tanggal 24-26 Syawal 1424 H / 19-21 Desember 2003 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

[36] Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syahab, *Dialog Front Pembela Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar : Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat Di Indonesia*, h. 128-133.

Gambar.1. Lambang Front Pembela Islam

Lambang ini memiliki arti sebagai berikut :

1. Warna dasar putih melambangkan kesucian .
2. Bintang timbul melambangkan ketinggian Islam.
3. Warna Hijau pada bintang melambangkan keislaman.
4. Tulisan berbahasa Arab "*A-ljabhatu addifaa'iyatu al-Islamiyyatu* " menunjukkan semangat Qurani.
5. Tulisan Front Pembela Islam berbahasa Indonesia menunjukkan rasa kebangsaan.
6. Warna hitam pada tulisan melambangkan ketajaman pemikiran dan ketegasan sikap serta keberanian mengambil keputusan.
7. Tasbih melambangkan dzikirullah dan religiuisitas.
8. Bentuk tasbih segitiga sama sisi yang diikat melambangkan kekuatan tali persaudaraan.
9. Sembilan puluh sembilan biji tasbih di setiap sisi melambangkan *asmaul husna* yang banyaknya sembilan puluh sembilan.

10. Tiga puluh tiga biji tasbih di setiap sisi melambangkan keadilan, persamaan dan pemerataan.
11. Warna hijau muda pada tasbih melambangkan kesejukan Islam.
12. Tiga biji tasbih pemisah dengan bentuk kubah masjid melambangkan keterikatan anggota dengan masjid.

Pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dilihat oleh FPI sebagai pintu gerbang penegakan syariat Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas konstitusi dan historis yang sangat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utamanya adalah adanya perlindungan hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan syariat Islam melalui perundang-undangan yang berlaku. Habib Rizieq memberikan fakta bahwa pihak kepolisian sering menghalang-halangi FPI dalam aksinya memberantas tempat-tempat maksiat. Alasan pihak kepolisian adalah bahwa Indonesia bukan negara Islam, dari itu FPI mengharapkan adanya penyempurnaan terhadap perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada nilai-nilai syariat Islam.[37]

Jika melihat konsep syariat Islam yang ditawarkan oleh FPI, dalam menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, nampak nyata apa yang dikatakan oleh Sharon Shiddique, sabagaimana yang dikutip dari Imam Tholkhah dan Abdul Aziz, bahwa konsep sosiologi barat selalu kurang memadai dalam mengamati Islam di Asia Tenggara, karena Islam tidak hanya memuat hubungan manusia dengan tuhannya,

[37] Imam Tholkhah dan Neng Dara Affiah, *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru Upaya Merambah Dimensi Baru Islam*, h. 160.

tetapi Islam juga bisa menjadi tuntutan dalam sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh karena itu, menurutnya lagi "implikasi yang paling fundamental dari kebangkitan Islam kontemporer dalam usaha yang giat untuk mengerahkan segala tatanan masyarakat dalam sebuah bentuk visi tentang realitas yang berinspirasikan ideologi dan karonik (sistem tata hukum)".[38]

Tujuan lain terbentuknya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan. Seperti prostitusi, perjudian, transaksi miras, narkoba dan berbagai bentuk kemunkaran lainnya. FPI juga mengusung untuk diterapkannya syariat Islam di wilayah NKRI pada khususnya dan diseluruh dunia pada umumnya. Selain itu FPI juga memperjuangkan masyarakat yang religius, bagaimana bisa menciptakan masyarakat religius kalau kemunkaran dan kemaksiatan merajalela. Untuk itu perjuangan FPI harus dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, apakah nanti dikatakan ingin mendirikan negara Islam atau tidak kita serahkan kepada yang menilai. Kalau FPI dikatakan ingin mendirikan Negara Islam itukan lebih kental dengan warna politiknya, sedangkan tujuan didirikannya FPI bukan tujuan politik dan bukan organisasi politik.[39]

B. Asas-asas Perjuangan Front Pembela Islam

FPI merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai. Sepanjang masih menganut paham *ahlussunnah waljama'ah*dan berpedoman pada Alquran

[38] Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta, Suara Islam Perss, 2013), h. 176.

[39] *Ibid.* h. 261.

sebagai sumber hukum utama, hadits sebagai sumber hukum kedua, ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga dan qiyas sebagai sumber hukum yang terakhir maka itu adalah bagian dari tubuh FPI. Selain itu FPI juga mengakui keragaman mazhab keagamaan seperti yang ada dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali.

Di dalam menjalankan perjuangannya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mana permaslahan itu berseberangan dengan hukum Islam maka FPI memiliki asas-asas perjuangan yang terurai dalam tujuh pilar.

a. Asas

FPI adalah organisasi amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan Islam dan berkidahkan Ahlussunnah Waljama'ah. Islam dijadikan dasar organisasi, karena memang Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Islam mengatur secara umum maupun secara rinci berbagai masalah dan tata cara kehidupan manusia. Sehingga wajib ia tunduk kepada aturan Islam secara utuh, menyeluruh dan tidak boleh separuh-separuh.

FPI adalah organisasi yang dilarang keras kepada seluruh pengikutnya untuk membenci Rosulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, apalagi sampai memusuhi dan menghina sahabat Nabi SAW.[40]

[40] Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syahab, *Dialog Front Pembela Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, h. 139.

b. Visi dan Misi

Visi dari FPI adalah menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan misinya adalah menciptakan umat sholihat yang hidup dalam *baldatun thoyyibatun* dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah 'Azza wa Jalla. Jadi, visi misi FPI adalah penegakan amar ma'ruf nahi munkar untuk penerapan syari'at Islam secara kâffah.

c. Pedoman

FPI adalah organisasi yang meletakkan “lima prinsip perjuangan Islam” yaitu;

1. Allah adalah tuhan kami.
2. Muhammad Rasulullah adalah teladan kami.
3. Alquranul karim adalah imam kami.
4. Al-jihad adalah jalan kami.
5. Mati syahid adalah cita-cita kami.

d. Semboyan

Semboyan perjuangan FPI adalah “hidup mulia atau mati syahid” semboyan ini sebenarnya diambil dari salah satu bagian dari wasiat Nabi SAW kepada sayyidina Ali bin Abi Tholib RA sebagaimana dinukil oleh As-syeikh Abdul Wahhab As-sya’roni RA dalam kitab Al-minah As-saniyah ‘Ala Al-Wasyiyyah Al-Matbuliyyah, pada halaman pertama dibagian Hamisyinya yang artinya “ hai Ali, kedudukanmu disisiku sebagaimana kedudukan Harun disisi Musa AS, hanya saja tidak ada nabi setelah aku, sesungguhnya hari ini aku berwasiat kepadamu dengan wasiat yang jika

engkau menjaganya maka *engkau hidup secara mulia dan engkau mati dalam keadaan syahid*." [41]

e. Motto

Motto manajemen strategi perjuangan FPI adalah "kebenaran tanpa direncanakan akan kalah dengan kebathilan yang direncanakan" kalimat ini diadopsi dari perkataan sayyidina Ali bin Abi Tholib, maksud dari kalimat ini adalah teknis perjuangan hak dan bathil bukan inti hak dan bathil itu sendiri. Jadi motto FPI menerangkan bahwasannya "pejuang kebenaran yang tidak disiplin akan dikalahkan oleh pejuang-pejuang kebathilan yang disiplin."

f. Filsafat

Filsafat juang FPI adalah "bagi mujahid difitnah itu biasa, dibunuh berarti syahid, dipenjara berarti 'uzlah, diusir berarti tamasya." Filsafat juang ini dimaksudkan bukan saja untuk merangsang keberanian dan kesiapan aktivis FPI dalam menghadapi segala resiko perjuangan, tetapi juga untuk menghidupkan kretivitas perjuangannya dalam menciptakan peluang dakwah pada kondisi sesulit apapun, sehingga duka tetap berhikmah, bahkan terasa menjadi suka sehingga menjadi tidak terasa susah.

g. Doktrin

Doktrin ini dimaksudkan untuk memberi imunisasi dan vaksinisasi perjuangan kepada para aktivis, sehingga mereka mampu mengusung, menghayati dan

[41] Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syahab, *Dialog Front Pembela Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar : Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia,* h. 157.

mengamalkan asas-asas perjuangan secara baik. Adapun doktrinisasi dalam menumbuh suburkan militansi para aktivis organisasi, maka FPI membangun militansi perjuangan organisasi di atas lima doktrin:

1. Mengikhlaskan niat.
2. Memulai dari diri sendiri.
3. Kebenaran harus ditegakkan.
4. Setiap orang pasti mati.
5. Mujahid di atas para musuhnya.

Sehubungan dengan doktrin ini, maka setiap aktivis FPI senantiasa diingatkan bahwa tanpa izin Allah tidak ada satupun kekuatan yang mampu menyentuhnya walaupun orang sedunia hendak mencelakakannya, karenanya sikap berserah diri kepada Allah wajib ditumbuhkembangkan.[42]

C. Struktur Organisasi Front Pembela Islam

FPI adalah organisasi independen yang tersistem rapi yang mana cakupan wilayah gerakannya bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi juga mencapai mencanegara dengan konsentrasi perjuangan dakwah di Indonesia, karena Indonesia adalah negara berpenduduk umat Islam terbesar di dunia karenanya FPI berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Jakarta dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang diseluruh Indonesia serta perwakilan yang ada di mancanegara.

[42] *Ibid*. h. 188.

Struktur organisasi yang disusun oleh FPI dalam beberapa cabang dan kriteria adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat pusat.
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ditingkat provinsi.
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ditingkat kabupaten / kotamadya.
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditingkat kecamatan.
5. Pos Komando (Posko) ditingkat kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Front (DPF) di luar negeri.

Struktur kepemimpinan FPI tersusun dalam dua komponen pimpinan yaitu ***"Majelis Syuro"*** dan ***"majelis Tanfidzi"*** Majelis Syuro adalah dewan tertinggi front yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. Majelis Syuro dalam melaksanakan tugasnya didampingi lima wakil ketua yang masing-masing adalah Ketua Dewan Tinggi Front.

1. Dewan Syariat.
2. Dewan Kehormatan.
3. Dewan Pembina.
4. Dewan Penasihat.
5. DewanPengawas.[43]

Majelis Tanfidzi ialah Badan Pengurus Harian dipimpin oleh seorang ketua umum yang dibantu oleh beberapa orang ketua dan seorang sekjen yang dibantu oleh

[43]*Ibid.* h. 194-195.

beberapa orang sekretaris serta seorang bendahara ahli yang dibantu oleh beberapa orang bendahara.

Majelis Tanfidzi di tingkat daerah, wilayah, cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan seorang sekretaris yang dibantu seorang wakilnya, serta seorang bendahara yang dibantu seorang wakilnya.

Selain ke lima dewan tersebut FPI juga memiliki 12 departemen, yaitu :

1. Departemen Agama membidangi ibadah, dakwah dan fatwa.
2. Departemen Luar Negeri membidangi urusan luar negeri.
3. Departemen Dalam Negeri membidangi urusan dalam negeri.
4. Departemen Bela Negara& Jihad membidangi pertahanan, keamanan dan jihad.
5. Departemen Sosial, Politik & HAM membidangi sosial, politik, hukum &HAM.
6. Departemen Pendidikan & Kebudayaan membidangi pendidikan &kebudayaan.
7. Departemen EKUIN membidangi ekonomi, keuangan dan industry.
8. Departemen Riset dan Teknologi membidangi riset dan teknologi.
9. Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan.
10. Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan.
11. Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan.
12. Departemen Kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak.[44]

Selain 12 departemen tersebut di atas FPI juga memiliki empat badan khusus yaitu :

[44] *Ibid*. h. 196.

1. BIF : Badan Investasi Front

   BIF bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan FPI, BIF memiliki dua divisi yaitu :

   a. Divisi Intelijen

      Divisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala bentuk aktivitas yang merugikan Islam dan FPI.

   b. Divisi Pencari fakta

      Divisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan informasi intelijen.

2. BTF : Badan anti Teror Front

   Ancaman, intimidasi dan berbagai teror hampir setiap saat menghampiri setiap aktivis FPI. Dalam hal ini BTF memainkan peranan penting untuk mengantisipasi, menghadapi dan melawan segala bentuk terror tersebut. BTF bekerjasama dengan BIF untuk melakukan "kontra teror" dan "kontra intelijen" terhadap musuh-musuh Islam yang melakukan terror ataupun penyusupan ke dalam aktivitas umat Islam. Salah satu tugas besar yang pernah dilakukan BTF adalah membebaskan belasan kyai dan aktivis Islam yang diculik dan ditangkapi oleh satgas PDIP pada malam pemilu, 6 Juni 1999. [45]

3. BPF : Badan Pendekatan Front

   BPF adalah badan khusus yang bertanggungjawab menangani sistem pengkaderan FPI, badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan dan pelatihan para

[45] *Ibid*. h. 197-198.

kader. BPF sangat menonjol fungsi dan peranannya dalam pembekalan satuan-satuan tugas FPI, khususnya LPI agar terampil dan terlatih secara fisik dan mental untuk membela Islam.

4. BAF : Badan Ahli Front

   BAF adalah laboratorium strategi FPI dalam pengkajian berbagai persoalan kehidupan dan disegala sector keilmuan. Di BAF inilah para pakar FPI dari berbagai disiplin ilmu berkumpul, ke dapan diharapkan BAF mempu tampil menjadi *think thank* bagi FPI, bagi kehidupan masyarakat secara umum.

Selain empat badan khusus tersebut FPI juga memiliki empat badan lembaga otonom,yaitu :

1. PMF : Lembaga Pemantau Maksiat Front

   PMF bekerjasama dengan BIF dalam menghimpun fakta dan data kemaksiatan di Indonesia, untuk selanjutnya dengan saksi dan barang bukti yang cukup maka pihak FPI yang bertugas untuk menggugat atau tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas kemaksiatan yang secara terang-terangan. PMF juga berkewajiban mencegah kemaksiatan secara dini sekaligus memberi penyuluhan kepada aktivis FPI maupun masyarakat tentang bahaya maksiat dan tata cara penanggulangannya. Untuk keperluan dan kelancaran tugas-tugas di atas, maka DPP FPI melalui PMF talah mendeklarasikan di awal tahun 2003 : "Indonesia Maksiat Watch."[46]

[46] *Ibid.* h. 198.

2. LDF : Lembaga Dakwah Front

   LDF adalah wadah silaturahim para muballigh / da'i FPI, sekaligus sebagai pusat pengembangan dakwah Islam yang diprogramkan. LDF memiliki dua fungsi internal dan eksternal, internal adalah mensosialisasikan dakwah di kalangan aktifis FPI, termasuk pembinaan mental spiritual dan pengembangan sumber daya dakwah yang dimiliki FPI. Sedangkan eksternalnya adalah mensosialisasikan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat umum yang bukan aktivis FPI. Selama ini LDF menjadi tulang punggung FPI dalam soal kehumasan, LDF berhasil menjadikan dunia dakwah sebagai media interaktif dalam sosialisasi tentang apa dan bagaimana FPI. Rencananya LDF di masa mendatang akan membentuk Korps Muballigh Front (KMF)

3. LEF : Lembaga Ekonomi Front

   Tugas LEF adalah membangun ekonomi FPI agar tidak menjadi organisasi yang lemah. Untuk itu LEF berkewajiban melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga ke depan FPI mampu mendanai perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas LEF tersebut tidak ringan, bahkan lima tahun periode kebangkitan FPI, 1998-2003 LEF jatuh bangun untuk bisa berdiri, hingga saat ini LEF masih terus membutuhkan suntikan dana segar.

4. BHF : Lembaga Bantuan Hukum Front

   BHF telah menunjukkan eksistensinya sebagai Lembaga Bantuan Hukum FPI sejak berdiri hingga kini tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih secara terus-menerus melakukan tindakan ligitasi dan advokasi untuk tiap aktivitas FPI.

Puluhan kasus penculikan, penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan aktivis FPI telah ditangani oleh BHF dengan sangat baik, laporan kasus wong cilik pun tidak luput dari pantauan dari BHF.[47]

Selain dari empat Lembaga Otonom, FPI memiliki empat anak organisasi, yaitu :

1. LPI : Laskar Pembela Islam

   Laskar ini adalah barisan pemuda FPI yang menjadi satuan tugas organisasi dengan fungsi serba guna dan juga menjadi ujung tombak aksi amar ma'ruf nahi munkar. Struktur kepemimpinan LPI ditingkat pusat disebut "Panglima Laskar," di tingkat provinsi disebut "Imam Laskar," di tingkat kabupaten/kotamadya disebut "Wali Laskar," ditingakat kelurahan/desa disebut "Amir Laskar" dan ditingkat regu disebut "Rois Laskar" sedangkan para laskar disebut "Jundi."

2. MPI : Mujahidah Pembela Islam

   Kehadiran MPI sebagai sayap FPI dimaksudkan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta semangat amar ma'ruf nahi munkar para kaum perempuan Islam. Misi utamanya adalah memperjuangkan hak-hak kaum wanita agar berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia dan di akhirat.

3. SPF : Serikat Pekerja Front

   Untuk pertama kalinya DPP FPI mencanangkan dan mendeklarasikan SPF di wilayah Tangerang atas desakan aktivis FPI Tangerang yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh pabrik dan Alhamdulillah setelah pembentukan SPF ini

[47] *Ibid.* h. 199.

tercatat ribuan buruh FPI menjadi anggota SPF, bahkan banyak buruh yang semula bukan anggota FPI ingin bergabung menjadi anggota SPF. Tujuan dibentuknya SPF ini untuk mengawasi suatu pabrik di mana aktivis FPI bekerja apakah di pabrik tersebut membuat sesuatu dari yang mana itu bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum negara, apabila terjadi penyelewengan maka akan diproses lebih lanjut untuk diperkarakan.

4. FMI : Front Mahasiswa Islam

   Sejumlah mahasiswa yang selama ini aktif dikelaskaran FPI berkeinginan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan saja secara fisik namun mereka juga ingin beramar ma'ruf nahi munkar dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya, sehingga wawasan akademiknya tidak mubazir, akhirnya digulirkan ide pembentukan FMI.

Keberadaan departemen, badan khusus, lembaga otonom dan anak organisasi dalam FPI disesuaikan dengan kebutuhan sehingga jumlahnya bisa bertambah dan bisa pula berkurang dari yang disebutkan di atas.

FPI telah menyatakan dirinya sebagai organisasi terbuka, artinya semua umat muslim dari semua kalangan yang punya tekad untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* semata-mata mencari ridho ilahi berhak untuk menjadi anggota organisasi ini.

Independensi FPI tidak berarti eksklusivisme organisasi, karena FPI tidak boleh jalan sendiri, tetapi harus bergandengan tangan dengan yang lainnya, saling berbagi tugas perjuangan dan independensi FPI tidak berarti tiada keberpihakan dengan siapapun atau dengan kalangan manapun baik itu individu, golongan, partai,

ormas maupun lainnya, karena FPI akan senantiasa berpihak kepada kebenaran, namun FPI tidak boleh netral di antara haq dan bathil, karena netral di antara haq dan bathil adalah kebathilan.[48]

FPI bukan partai politik tapi bukan berarti ummatnya dilarang berpolitik, bahkan salah satu departemen dalam dewan pimpinan pusat FPI sejak didirikan hingga kini adalah departemen sosial politik dan ham (Depsospolhuk & HAM).

Dalam memandang percaturan dunia politik FPI membagi dua tipe peta perpolitikan dalam dua kelas yaitu :

Pertama: *High Class Politycal*, yaitu politik kelas tinggi, di kelas ini permainan politik atas dasar idealisme yang tinggi dan memiliki visi misi yang murni untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam kelas ini tidak ada kompromi ideologi atau tawar menawar prinsip, yang ada hanya tarik ulur strategi perjuangan dalam koridor visi misi yang telah ditetapkan, cara-cara kotor tidak ada tempat dikelas ini.

Kedua: *Law Class Politycal*, yaitu politik kelas rendah, dikelas ini permainan politik atas dasar keuntungan kekuasaan semata dan visi misi yang disesuaikan, sehingga kompromi ideologi dan tawar menawar prinsip menjadi sesuatu yang lumrah dan lazim, kebohongan menjadi keharusan dan cara-cara kotor sering dilakukan. Karenanya di dalam kelas ini tidak ada teman atau musuh abadi, hari ini berteman besok bermusuhan dan

[48] *Ibid*. h. 202-203.

begitulah seterusnya sekalipun antar kelompok yang saling bertentangan visi dan misi nya.

Bagi FPI, kalaupun harus berpolitik maka hanya High Class Politikal yang boleh digeluti tidak yang lainnya. Pilihan wajib FPI adalah politik yang bersih dan politik untuk kemaslahatan umat bukan kelompok atau golongan apalagi pribadi.

Politik manapun dan dari siapapun yang tidak berlandaskan iman dan taqwa maka politik tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok atau bahkan pribadi. FPI hanya berpihak pada politik Islam dan yang berjuang demi tegaknya syariat Islam. Sesuai dengan misinya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* disetiap aspek kehidupan, maka setiap kemungkaran itu terjadi dalam bidang politik, FPI pun terpanggil untuk melawan kemungkaran politik tersebut, walaupun untuk melawannya FPI terpaksa harus berpolitik.[49]

D. Mekanisme Prosedur Standar Gerakan Front Pembela Islam

Sesuai dengan pola juang FPI, maka mekanisme prosedur standar gerakan FPI dalam menjalankan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar yang diletakkan oleh organisasi adalah sebagai berikut.

a. Pengambilan keputusan berdasarkan syariat Islam.

Untuk mengambil suatu keputusan apalagi yang berkaitan dengan gerakan fisik amar ma'ruf nahi munkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap sarang maksiat maka FPI harus mengkajinya terlebih dahulu dalam laboratorium syariat.

[49]*Ibid*. h. 206.

Lalu di kaji lebih mendalam oleh para petinggi FPI apa dan bagaimana strategi yang mesti dilakukan.

b. Pelaksanaan keputusan dengan menempuh prosedur hukum formal negara terlebih dahulu.

Dalam rangka menghindari jebakan melawan hukum khususnya menyangkut gerakan fisik dalam melawan kemunkaran maka diperlukan prosedur hukum formal, adapun prosedur hukum formal tersebut meliputi :

1. Menghimpun data dan fakta sebagai bukti hukum adanya kemunkaran yang melanggar hukum agama dan hukum negara.
2. Menghimpun dukungan konkrit masyarakat sekitar yang telah diganggu dan dirugikan oleh kemunkaran yang terjadi di wilayah permasalahan.
3. Membuat laporan dan tuntutan keseluruh instansi negara yang berwenang baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sesuai dengan tingkat wilayah permasalahan.
4. Penggunaan dan pemanfaatan kekuatan umat saat prosedur menemui jalan buntu.

Pada saat prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu dan berbagai pertimbangan telah dilakukan dengan cermat sesuai dengan syariat, maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat. Sehubungan dengan mekanisme perjuangan ini maka FPI membagi wilayah sasaran aksi *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi dua.

c. Wilayah aksi *amar ma'ruf*

Wilayah ini adalah wilayah yang padat akan perbuatan maksiat dan didukung oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut tidak merasa terganggu dengan kemaksiatan yang ada di wilayah tersebut.

Wilayah ini FPI tidak boleh melakukan aksi keras melawan maksiat, karena akan menciptakan benturan dengan masyarakat yang memang pada dasarnya belum memiliki kesadaran beragama yang baik. Untuk menghindari konflik horizontal antara FPI dengan masyarakat maka FPI berkewajiban melakukan *amar ma'ruf* dengan menyemarakkan dakwah di wilayah semacam ini untuk menyadarkan umat dari bahaya maksiat.[50]

d. Wilayah aksi *nahi munkar*

Wilayah ini adalah wilayah yang padat maksiat dan ditolak masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut sudah diresahkan dan diganggu oleh aktivitas kemaksiatan yang ada. Wilayah ini mewajibkan FPI mendorong dan membantu mayarakat secara optimal untuk menindak tegas kemaksiatan yang ada, karena tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat relatif baik, peranan FPI di sini sebagai pelayan umat dalam *beramar ma'ruf nahi munkar*.

Sehubungan dengan mekanisme perjuangan organisasi, maka FPI memandang perlu untuk menggariskan tertib aksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana yang telah digariskan syariat, yang pelaksanaannya mengutamakan tertib secara berurutan dengan tetap memegang ketentuan mengutamakan kelembutan daripada ketegasan.

[50] *Ibid.* h. 245.

Dengan ini maka organisasi membagi tipe dalam beramar ma'ruf nahi munkar menjadi dua tipe.

e. Tertib Aksi *Amar Ma'ruf*

Allah SWT berfirman di dalam Alquran surat An-nahl ayat 125 yang artinya:" Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".

Berdasarkan ayat ini maka tertib dalam *beramar ma'ruf* yang telah ditetapkan oleh FPI adalah :

1. Berdakwah dengan hikmah (ilmu dan amal).
2. Berdakwah dengan nasihat yang baik.
3. Berdakwah dengan dialog dan diskusi.

Dakwah dengan nasehat yang baik juga bergantung pada ilmu dan amal. Mustahil suatu nasehat dikatakan baik jika datang dari kebodohan, karena nasehat yang baik hanya datang dari ilmu dan amal sipemberi ilmu tersebut. Begitu pula dakwah dengan dialog dan diskusi, tanpa ilmu maka dialog dan diskusi akan berubah seperti debat kusir yang tiada arti. Tanpa amal maka diskusi dan dialog maka debat akan menjadi ajang debat kemunafikan. Dakwah dengan nasehat yang baik lebih didahulukan daripada dakwah dengan dialog dan diskusi.

f. Tertib Aksi *Nahi Munkar*

Rasulullah SAW bersabda seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-imam Muslim RA yang artinya : " Barang siapa diantara kamu yang melihat suatu kemunkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu juga dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman.[51]

Perlu kita waspadai adanya upaya penyimpangan makna hadits dengan mengartikan lafadz "tangan" sebagai kekuasaan semata. Kekuasaan yang dimaksud adalah jabatan atau kedudukan dengan sejumlah kewenangan, sehingga pengertian yang muncul dari hadits tersebut bahwasannya jika seseorang tersebut memiliki kekuasaan dalam bentuk kekuasaan atau kedudukan maka wajib mencegah kemunkaran dengan kekuasaannya dan jika ia tidak memiliki kekuasaan tersebut maka cukup mengingkarinya dengan lisan dan hatinya saja.

Untuk meluruskan umat terhadap hadits tersebut maka penulis akan memaparkan seperti yang telah dikatakan oleh Al-habib Muhammad Rizieq Syihab di dalam bukunya yang berjudul "*Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*" sebagai berikut :

1. Lafazh "Barang Siapa" adalah lafazh "Umum" yang pengertiannya mencakup siapa saja ulama ataupun umaro, pejabat ataupun rakyat. Sehingga hadits tersebut menuntut semua pihak yang melihat kemunkaran untuk merubahnya.

[51] *Ibid*. h. 247.

2. Lafazh “Daripada kamu” membatasi bahwasannya yang dimaksud “Barang siapa” hanya terbatas pada kaum muslimin, karena Rasulullah SAW menggunakan lafazh tersebut ditujukan kepada pihak yang diajak bicara yaitu kaum muslimin. Jadi, muslim manapun yang melihat kemunkaran berkewajiban untuk merubahnya.
3. Lafazh “Dengan tangannya” mengarah pada makna hakiki. Artinya merubah kemunkaran dengan tangan sebenarnya, yaitu anggota tubuh dari ujung jari sampai keujung ketiak. Makna hakiki ini diperkuat dengan lafazh “Barang siapa” tadi, sehingga mencakup tangan ulama, umara, dan rakyat biasa. Ditambah lagi setelahnya ada lafazh “Lisan” dan “Hati” keduanya menunjukkan organ tubuh pula, jadi yang dimaksud dengan “ Tangan ” dalam hadits tersebut adalah (Organ Tangan Manusia).
4. Hadits tersebut menunjukkan tertib langkah bukan pilihan langkah dalam nahi munkar. Hal ini jelas sekali karena perpindahan satu langkah ke langkah berikutnya diikat dengan lafazh “Jika ia tidak mampu” dengan demikian selama ia masih mampu maka ia tidak boleh meninggalkan langkah tersebut.[52]

Dari pemaparan di atas maka jelaslah ke arah mana hadits tersebut menuntun, kita tidak memungkiri bahwa lafazh “Tangan” memang secara majasi boleh diartikan dengan kekuasaan/kekuatan, namun selama makna hakiki masih bisa dipahami, maka jangan kita selalu mengarahkan makna majasi tanpa ada keperluan yang mendesak, apalagi dengan membatasi pengertian hanya kepada makna majasi sambil

[52] *Ibid*. h. 248-249.

mengenyampingkan makna hakiki. Sekurang-kurangnya kita tetap berpegang kepada makna hakiki selama memungkinkan sambil menggunakan makna majasi sekedar untuk mengembangkan wacana.

Dari penjelasan di atas maka FPI membagi tertib aksi *nahi munkar* yang telah ditentukan tata caranya adalah :

1. Nahi munkar dengan tangan/tenaga/kekuatan/kekuasaan.
2. Nahi munkar dengan lisan.
3. Nahi munkar dengan hati/dengan sikap.

Nahi munkar dengan tangan harus sudah mencakup *nahi munkar* dengan hati dan lisan.Artinya bahwa *nahi munkar* dengan tangan pada prakteknya tetap harus didahului *nahi munkar* dengan hati dan lisan. Hal ini untuk menjaga ketentuan baku "Mengedepankan kelembutan daripada ketegasan."

Nahi munkar dengan lisan walau tidak mencakup *nahi munkar* dengan tangan, tapi harus sudah mencakup *nahi munkar* dengan hati dan *nahi munkar* dengan hati adalah perjuangan kaum lemah yang memang tidak memiliki kekuatan lisan apalagi tangan. Nahi munkar dengan hati harus dilakukan secara spontan bersamaan dengan didapatkannya *kemunkaran.* Dalam menjalankan prosedur tersebut sangat diatur dan disusun secara sistematis, adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

g. Prosedur Menutup Tempat Maksiat Tanpa Izin Pemerintah.

1. Mengirimkan surat protes dan peringatan keras ke pemilik/penguasa tempat tersebut, dengan mencantumkan tembusan ke beberapa instansi pemerintah

maupun aparat seperti, lurah/camat/Kapolsek/Babinsa/Danramil dan ulama setempat sebagai pemberitahuan serta ke MABES LPI sebagai laporan.

2. Bila tidak ditanggapi sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan, bila tidak juga ditanggapi maka FPI akan bergerak bersama masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut.

h. Prosedur Menutup Tempat Maksiat Yang Memiliki Izin Pemerintah

1. Mengirimkan surat protes dan tuntutan pertama ke lurah dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, Binmas, Babinsa dan ulama setempat serta ke MABES LPI sebagai laporan pemberitahuan.
2. Bila setelah satu pekan/satu bulan tidak ditanggapi, maka akan mengirimkan surat protes dan tuntutan kedua ke camat dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, Kapolsek, Danramil dan ulama setempat serta MABES LPI sebagai laporan dan pemberitahuan dengan melampirkan surat tuntutan pertama.
3. Setelah satu pekan/satu bulan tidak ditanggapi, maka mengirimkan surat protes dan tuntutan ketiga ke walikota/bupati dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, DRPD tk. II, Kapolres, Dandim dan ulama kotamadya/kabupaten setempat serta MABES LPI sebagai laporan dan pemberitahuan dengan melampirkan surat pertama dan kedua.
4. Apabila setelah satu pekan/satu bulan tidak ditanggapi maka akan mengirimkan surat protes dan tuntutan terakhir (ultimatum) ke gubernur

dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, DPRD tk. I, Kapolda, Danrem, Pangdam dan ulama provinsi setempat serta MABES LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan surat pertama, kedua dan ketiga).

5. Bila setelah satu pekan/satu bulan tidak ditanggapi maka baru melibatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut yang dalam pelaksanaannya wajib mengkoordinasikannya dengan LPI dan aparat pemerintahan/keamanan yang berwenang.

i. Prosedur Administratif

1. Setiap surat yang dikirim harus ada tanda terima dan dibuat arsipnya untuk disimpan dengan baik.
2. Setiap surat yang dikirim harus dilampirkan dengan foto copy pernyataan masyarakat setempat tentang ketidaksetujuan mereka dengan keberadaan tempat maksiat tersebut dan dilengkapi dengan tanda tangan mereka sebanyak mungkin dan aslinya tetap harus disimpan sebagai arsip.
3. Setiap surat yang dikirimkan harus dilampirkan dengan bukti adanya kemaksiatan di tempat maksiat tersebut, seperti foto/film tentang transaksi maksiat yang terjadi di dalamnya atau barang bukti lainnya.
4. Setiap surat yang dikirim dianjurkan untuk ditembuskan pula ke pers, baik itu media cetak maupun elektronik untuk kepentingan publikasi dalam pembentukan opini.

5. Selama proses pengiriman surat berlangsung dianjurkan untuk melakukan penggalangan opini anti maksiat lewat tabligh, diskusi, siaran pers, pamphlet, spanduk stiker dan bentuk publikasi lainnya yang disebarluaskan kepada masyarakat setempat, jika perlu digelar aksi demo damai ke tempat maksiat tersebut dan instansi terkait.[53]

j. Prosedur Internal Menutup Tempat Maksiat

1. Ada kesepakatan antara pengurus dan petinggi FPI setempat.
2. Ada restu DPC/DPW FPI setempat.
3. Ada koordinasi dengan MABES LPI setempat.

k. Larangan Dalam Prosedur Standar

1. Dilarang memeras, merampas, menjarah, merusak, membakar, menganiaya dan membunuh.
2. Dilarang mengganggu orang atau pihak manapun yang tidak bersalah.
3. Dilarang melakukan penipuan, penghinaan dan pelecehan serta segala bentuk kemaksiatan.
4. Dilarang melewan aparat secara fisik.
5. Dilarang menggunakan senjata tajam, api dan bahan bakar/bahan peledak.

l. Prosedur Membela Diri

1. Melumpuhkan lawan dengan cara yang paling ringan resikonya.
2. Setelah dilumpuhkan wajib menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.

[53] *Ibid.* h. 250-252.

3. Bila terpaksa sekali maka dengan cara yang paling tegas dank eras, itupun hanya dalam konteks belapaksa/beladiri.

m. Sanksi Pelanggaran Prosedur

Barang siapa dari aktivis Laskar FPI yang dengan sengaja melanggar prosedur tersebut di atas maka akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

1. MABES LPI tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala sepak terjangnya.
2. Sipelanggar akan dikenakan sanksi organisasi yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan kadar kesalahan.
3. Bagi pelanggar pidana maka MABES LPI akan menyerahkannya kepada yang berwenang.[54]

n. Prosedur Menangani Resiko Aksi

1. Bila dalam aksi laskar FPI sesuai dengan prosedur mengakibatkan adanya aktivis laskar FPI yang berurusan dengan aparat penegak hukum, maka MABES LPI berkewajiban melakukan upaya pembelaan hukum secara profesinal, baik dalam hal ligitasi, maupun advokasi.
2. Bila aktivis laskar FPI tersebut terpaksa harus ditahan/dipenjara sebagai bagian dari resiko perjuangan, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk senantiasa memperhatikan kondisinya serta berkewajiban membantu keluarga yang menjadi tanggungannya selama yang bersangkutan melaksanakan hukuman, teknis pelaksanaan dari semua itu harus diatur oleh MABES LPI.

[54] *Ibid*. h. 253.

3. Bila terjadi korba jiwa dari barisan laskar FPI maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk ikut serta dalam mengurus jenazahnya serta membantu secara moril maupun materil bagi keluarga korban dan ikut serta mengirimkan do'a bagi sikorban, MABES LPI wajib mencari tahu pelaku pembunuhan terhadap anggotanya kemudian mengejar, menangkap dan menyerahkannya kepada hukum atau bila terpaksa menindaknya dengan tegas dank eras setimpal dengan perbuatannya dalam konteks belapaksa/beladiri.
4. Bila dalam aksi tersebut menimbulkan kerugian di pihak ketiga yang tidak bersalah dan tidak ada kaitan dengan kemaksiatan yang ada sebagai akses kejadian dilapangan yang terkadang tidak terkendali dan tanpa disengaja, maka MABES LPI berkewajiban meminta maaf serta mengganti rugi kepada pihak yang bersangkutan dan oknum FPI harus bertanggungjawab.

o. Prosedur Memenuhi Permintaan Umat Dalam Menutup Tempat Maksiat

Bila tadi dengan panjang lebar penulis paparkan prosedur standar gerakan anti maksiat bagi laskar FPI, maka di sini penulis perlu paparkan pula prosedur yang harus ditempuh umat dalam meminta bantuan FPI untuk menutup tempat maksiat :

1. Surat permohonan umat yang ditulis secara resmi ditujukan ke FPI.
2. Tanda tangan warga sekitar tempat maksiat yang dikeluhkan sebanyak-banyaknya.
3. Pelaksaan investigasi oleh FPI ke lokasi maksiat untuk menghimpun bukti.
4. Mengikuti prosedur standar gerakan anti maksiat bagi organisasi.

Prosedur standar gerakan amar ma'ruf nahi munkar FPI yang menggiring dan membatasi ruang aksi dalam koridor hukum agama dan hukum negara adalah prosedur yang paling ideal bagi aktivis FPI di manapun mereka berada.

Soal banyaknya aktivis FPI yang ditangkap dan menjadi terpidana dalam hukum positif NKRI, bukanlah karena kesalahan pada prosedur standar maupun ketentuannya, akan tetapi karena penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyalahi dari prosedur standar maupun ketentuannya. Lagi pula kalaupun aksi FPI sudah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara tidak berarti bahwa aktivis FPI pasti selamat dari penangkapan dan penahanan aparat. Karena di negeri ini masih banyak oknum aparat yang melanggar hukum atas nama hukum, sehingga manakala bisnis pelanggaran hukum mereka terusik oleh aksi FPI, maka dengan kekuatan, kekuasaan dan wewenang, merekapun merekayasa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI untuk kemudian menempatkan para aktivis FPI diposisi yang selalu salah lalu mempidanakannya.[55]

[55]*Ibid.* h, 254.

BAB III
GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM KOTA PALEMBANG

A. Sekilas Tentang Kota Palembang

Kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Didasarkan dari prasasti Kedukan Bukit yang diketemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.[56]

Kota Palembang terletak antara $2^0$52' dan $3^0$5' Lintang Selatan dan antara $104^0$37' dan $104^0$52' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 40,061 Ha atau sekitar 2,65 persen dari total luas daratan.

Suhu udara rata-rata di Kota Palembang tahun 2014 berkisar antara 26,60^{0}C sampai dengan 28,30^{0}C. Dimana suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan

[56] Retno Purwanti, Perubahan Pola Pemukiman Masyarakat Palembang dalam Perspektif Arkeo-Ekologi, *Tamaddun, Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, No.2, Vol. 4, (Palembang : Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah, 2004), h. 10.

terendah pada bulan Desember.Kelembapan udara rata-rata bervariasi antara 73 persen sampai dengan 87 persen.[57]

Kota Palembang hanya memiliki dua musim yaitu, musim kemarau dan musim hujan. Sungai Musi membelah dua wilayah Palembang menjadi dua yaitu Seberang Ulu yang terletak di sebelah Selatan dan Seberang Ilir terletak di sebelah Utara. Daerah Seberang Ulu merupakan daerah rawa-rawa, di wilayah ini terdapat muara-muara Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Keramasan dengan mengalirkan beberapa anak sungai tersebut. Daerah Seberang Ilir merupakan daerah yang lebih banyak daratannya daripada sungainya, sedangkan rawa-rawa hanya dijumpai disekitar tepian sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Musi seperti Sungai Sekanak, Sungai Kedukan, Sungai Lawang Kidul, Sungai Buah dan Sungai Lambidaro, daerah tertinggi di Kota Palembang terletak di sebelah utara menuju ke daerah Talang Betutu dan Talang Tuo.[58]

Tanah di Palembang relatif rendah sehingga terdapat banyak rawa, setidaknya terdapat paling sedikit 43 titik banjir yang menggenangi Kota Palembang, masing-masing berada di kecamatan Ilir Timur I sebanyak enam lokasi, Ilir Timur II 12 lokasi, Kalidoni tiga lokasi, Kemuning tiga lokasi, Sako satu lokasi, Ilir Barat I empat lokasi, dan Seberang Ulu II dua lokasi. Di lokasi itu, ketinggian air biasanya antara 15

[57] Lihat dalam Palembangkota.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/statistik-daerah-kotapalembang-Tahun-2015.pdf. diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

[58] Retno Purwanti, Perubahan Pola Pemukiman Masyarakat Palembang Dalam Perspektif Arkeo-Ekologi, *Dalam Tamaddun, Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, No.2, Vol. 4, h. 11.

hingga 75 cm. Untuk lokasi yang sering tergenang air terutama pada jalan-jalan umum berada di 11 lokasi.

Jumlah kecamatan pada tahun 2000 bertambah enam kecamatan dan lima kelurahan. Sementara itu pada tahun 2007 bertambah lagi dua kecamatan dan empat kelurahan.Namun setelah itu tidak lagi terjadi pemekaran wilayah sehingga jumlah kecamatan dan kelurahan saat ini masing-masing 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

Secara wilayah administratif, letak Kota Palembang berbatasan dengan daerah-daerah :

a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balai Makmur Kecamatan Merah Mata Kabupaten Banyuasin.
c. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. [59]

Jumlah penduduk kota Palembang tahun 2014 masih pada kisaran 1,5 juta jiwa. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 23 ribu jiwa, kepadatan Penduduk juga meningkat dari 3.834 jiwa/km menjadi 3.890 jiwa/km dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Komposisi penduduk Kota Palembang didominasi oleh penduduk muda.Hal ini terlihat dimana angka terbesar

[59] Lihat dalam palembangkota.bps.go.id, diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

berada pada kisaran umur 15 hingga 64 tahun yaitu sebesar 69 persen. Kemudian penduduk usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 26 persen dan terakhir penduduk usia lebih dari 65 tahun yang mencapai 2 persen. Jumlah Keluarga di Kota Palembang pada tahun 2014 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 300 ribu keluarga.[60]

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Pada Pertengahan Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1. Ilir Barat II	32,838	32,717	65,555	100.370
2. Gandus	30,964	30,849	61,813	100.737
3. Seberang Ulu I	87,635	87,310	174,945	100.372
4. Kertapati	41,970	41,813	88,783	100.375
5. Seberang Ulu II	49,040	48,857	97,897	100.375
6. Plaju	40,716	40,564	81,280	100.375
7. Ilir Barat I	67,666	67,414	135,080	100.374
8. Bukit Kecil	22,005	21,924	43,929	100.369
9. Ilir Timur I	34,317	34,189	68,506	100.374
10. Kemuning	42,360	42,202	84,562	100.374
11. Ilir Timur II	82,120	81,814	163,934	100.374
12. Kalidoni	54,924	54,720	109,644	100.373
13. Sako	45,079	44,911	89,990	100.374
14. Sukarami	18,526	18,457	36,983	100.374
15. Sematang Borang	79,818	79,521	159,339	100.373
16. Alang-Alang Lebar	50,720	50,531	101,251	100.374
JUMLAH	769 000	780,698	777,793	1,558,491

(Sumber: palembangkota.bps.go.id)

[60] Lihat dalam Palembangkota.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/statistik-daerah-kotapalembang-Tahun-2015.pdf, diakses.pada tanggal 25 Januari 2016.

Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu *Baso Pelembang Alus atau Bebaso* dan *Baso Pelembang Sari-sari*. Baso Pelembang Alus dipergunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang-orang tua, atau orang-orang yang dihormati, terutama dalam upacara-upacara adat. Bahasa ini berakar pada bahasa Jawa karena raja-raja Palembang berasal dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang. Itulah sebabnya perbendaharaan kata Baso Pelembang Alus banyak persamaannya dengan perbendaharaan kata dalam bahasa Jawa.Sementara itu, Baso sehari-hari dipergunakan oleh orang Palembang dan berakar pada bahasa Melayu.[61]

Dalam praktiknya sehari-hari, orang Palembang biasanya mencampurkan bahasa ini dan Bahasa Indonesia (pemilihan kata berdasarkan kondisi dan koherensi) sehingga penggunaan bahasa Palembang menjadi suatu seni tersendiri. Bahasa Palembang memiliki kemiripan dengan bahasa daerah provinsi di sekitarnya, seperti Jambi, Bengkulu bahkan Jawa (dengan intonasi berbeda). Di Jambi dan Bengkulu, akhiran ‘A’ pada kosakata bahasa Indonesia yang diubah menjadi ‘O’ banyak ditemukan.

Kota Palembang merupakan kota metropolitan yang struktur perekonomiannya lebih banyak ditunjang oleh sektor non pertanian. Pada tahun 2014 produksi padi mencapai 19.099 ton atau mengalami kenaikan sebesar 10.529.72 ton (64,46 persen) dibandingkan produksi padi tahun 2013.

[61] Lihat dalam Palembangkota.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/statistik-daerah-kotapalembang-Tahun-2015.pdf, h, 11, diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

Penurunan produksi padi tersebut diringi juga dengan penurunan luas panen padi dari 6.264 ha menjadi 5 849 ha, atau turun sebesar 415 ha (6,62 persen). Untuk produksi Palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu semuanya mengalami penurunan baik dari sisi produksi maupun luas panen.

Untuk jagung produksi dan luas panennya turun sebesar 36,90 persen. produksi kacang tanah, mengalami penurunan dari 54,53 ha tahun 2013 menjadi 32,00 ha (turun 41,31 persen), begitu juga untuk luas panen jagung mengalami penurunan sebesar 50 persen. Produksi Ubi Kayu juga mengalami penurunan sebesar 93,26 persen. Berbanding terbalik untuk ubi jalar justru mengalami peningkatanyaitu dari, 125,04 ton tahun 2013 menjadi 190,3 ton tahun 2014 (naik 93,42persen).[62]

Kota Palembang adalah kota yang sekitar 90% penduduknya beragama Islam sedangkan yang 10% nya adalah agama Kristen, Hindu, Buhda dan Katolik.[63]

B. Front Pembela Islam Kota Palembang

Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik Indonesia. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi

[62] Lihat dalam palembangkota.bps.go.id, artikel ini diakses pada tanggal 25 Januari 2016.
[63] BPS, *Statistik Daerah Kota Palembang 2010*, h, 18.

sosial membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Syarikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama), Syarikat Dagang dan lain-lainnya. Pada masa prakemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat. Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrument organisasi yang bersifat nasional.[64]

Begitu juga halnya dengan berdirinya organisasi Front Pembela Islam yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 bertepatan pada hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hanya selang sekitar tiga bulan setelah jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto. Front Pembela Islam merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan telah memiliki cabang dibeberapa daerah diseluruh Indonesia.[65]

Front Pembela Islam Sumatera Selatan adalah cabang pertama kali yang didirikan oleh FPI pusat atas inisiatif dan kerjasama antara ulama, tokoh masyarakat dan umat di Kota Palembang. FPI Sumatera Selatan didirikan hanya selisih waktu dua bulan dari didirikannya FPI pusat dan diresmikan pada tanggal 17 september 1998 tepatnya di Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang

[64] Lihat dalam https://banjirembun.blogspot.com/2014/06/03organisasi-keagamaan-indonesia-studi.html, diakses pada tanggal 25 januari 2015.

[65] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi Syahab sekertaris DPP FPI Kota Palembang, pada tanggal 14 September 2014.

disaksikan oleh beberapa ulama diantaranya adalah Al-Habib Umar Abdul Aziz Syahab, KH. Ali Umar Thoyyib, Al-Habib Muhammad Syihab, Al-Habib Muhammad bin Nagip Alkaff,Prof. Dr. Utsman Said S,Pog dan lainnya, aparat dan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menegakkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar.

Proses berdirinya organisasi ini diawali oleh musyawarah sejumlah ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah yang ada di Kota Palembang dan pendiriannya murni atas dasar keinginan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Kota Palembang yang menginginkan adanya suatu gerakan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar.

Markas FPI Kota Palembang sudah berpindah tempat dua kali yang pertama adalah di belakang Pasar Kuto, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur I. Setelah jeda waktu lima bulan maka markas dipindahkan ke Jl. Dr. Muhammad Isa, lorong Gubah, Kel Kuto Batu, Kec. Ilir Timur I. Markas yang ada di lorong Gubah tetap bertahan hingga saat ini.[66]

Seiring bergantinya waktu dan melihat perhatian serta penerimaan akan kegiatan-kegiatan FPI di masyarakat maka secara bertahap warga sekitar mulai tertarik untuk mengikuti dakwah yang telah dilakukan oleh pengurus FPI. Ada yang mendaftar menjadi anggota, ada yang menjadi simpatisan dan ada yang hanya

[66] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi Syahab, sekertaris DPP FPI Kota Palembang pada tanggal 14 September 2014.

mengikuti pengajiannya saja, namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya banyak juga masyarakat yang tidak tahu dan tidak mau tahu dengan adanya ormas ini.[67]

Berikut ini adalah nama-nama pengurus pertama FPI Kota Palembang pada masa awal berdiri :

Ketua : KH. Ali Umar Thoyyib.

Wakil Ketua : Al-habib Umar Abdul Aziz Syahab.

Sekretaris : Prof. Dr. Utsman Said, S,Pog.

Bendahara Umum : Al-Habib Husein Almunawwar.

Untuk masa kepemimpinan ini berlangsung selama satu periode dengan kurun waktu lima tahun.[68]

C. Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang

Setiap organisasi, komunitas ataupun semacamnya biasanya dibentuk atas dasar sebuah tujuan dan cita-cita yang ingin mereka capai. Untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan diperlukan perumusan sebuah metode dan strategi yang strategis agar semua yang mereka lakukan tidak berlawanan dengan segala macam hukum dan aturan yang telah ditentukan, hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari kontroversi yang berujung pada pembredelan dan konflik, meski konflik tidak bisa dihilangkan dalam dinamika kehidupan yang selalu dinamis.

[67] Wawancara pribadi dengan Gunawan, warga kelurahan Kuto Batu, pada tanggal 28 Desember 2014.

[68] Arsip FPI Kota Palembang.

FPI merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. Gerakannya yang kerap diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang radikal telah menimbulkan ketakutan dan bahkan menjadi momok bagi sebagian anggotan masyarakat.[69]

Bermula dari latar belakang sejarah berdirinya, FPI merupakan organisasi keislaman yang fokus perjuangannya adalah penegakan Islam secara menyeluruh yang mereka yang mereka inginkan merupakan kelanjutan perjuangan M. Natsir dan kawan-kawan pada sejarah awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat piagam Jakarta dan UUD 1945 serta pasal 29 ayat 1 yang intinya pemberlakuan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia.[70]

FPI memiliki strategi dalam menjalankan visi dan misinya yaitu dengan jalan dakwah dan juga hisbah (*amar ma'ruf nahi munkar*), dakwah yang dilakukan oleh organisasi ini adalah mendidik para anggota dan masyarakat umum untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan khusus untuk para anggota serta pengurus untuk taat terhadap aturan-aturanyang telah ditetapkan dalam AD-ART organisasi .

Ada beberapa argument bagi pemikiran FPI mengapa syariat Islam harus diberlakukan di Indonesia, yaitu :

a. Argumentasi naqly (normatif), di dalam Alquran Allah SWT menjelaskan tentang perlunya menegakkan atau memberlakukan syariat Islam. Bagi seluruh umat Islam

[69] Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 129.

[70] Syahrul Efendi D, *Habib FPI Gempur Playboy*, (Jakarta : Rajanya Penerbit Islam, 2006), h. 145.

berkewajiban memeberlakukan syariat Islam ini umpama seorang hartawan yang membangun sebuah perusahaan dengan modalnya sendiri kemudian hartawan itu membuat peraturan dalam perusahaannya itu dengan baik dan tidak mengabaikan hak-hak pegawainya, agar peraturan itu dipatuhi oleh pegawainya tentulah hal tersebut menjadi baik bagi sihartawan dan kewajiban mematuhinya bagi para pegawai. Nah, bagaimana pula dengan Allah yang maha mengetahui yang menciptakan manusia dan alam semesta ini, sudah barang tentu syariat yang Dia tetapkan menjadi kewajiban bagi para hamba-Nya yang mentaatinya tanpa ada protes.

b. Argumentasi historis, sejak dahulu kala syariat Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengaturan kehidupan masyarakat, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di nusantara jauh sebelum kedatangan Belanda sudah menjadikan hukum Islam sebagai alat pengaturan hubungan masyarakat.
c. Argumentasi kebutuhan yang mendesak, kondisi masyarakat Indonesia yang sudah parah dengan penyakit kemaksiatan (dekadensi moral), membutuhkan resep yang tepat untuk mengobati penyakit sosial ini, penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah resep yang diperlukan untuk penyakit tersebut.
d. Argumentasi politis, bagi FPI kepentingan umat Islam yang mayoritas untuk memberlakukan syariat Islam yang harus dikedepankan daripada kepentingan minoritas, kepentingan umat Islam yang 88-90% tidak boleh dikorbankan oleh karena untuk menjaga kepentingan umat lain yang hanya di bawah 15%. Dalam istilah FPI hal ini disebut sesuai dengan asas proporsi kemayoritasan atau

proporsional rasionalistis yang bukan diskriminatif, sebab sudah ada jaminan bagi penduduk yang bukan beragama Islam untuk tidak harus memeluk agama Islam.[71]

Untuk mengantisipasi agar masalah yang terjadi tidak berkelanjutan maka harus ada sebuah gerakan yang mampu menyelesaikan atau minimal mencegah segala perbuatan buruk tersebut. Untuk itulah harus ada segolongan umat baik itu yang bergerak dalam bidang organisasi maupun partai untuk mendakwahkan ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat.

Adapun pengertian dakwah terbagi dalam dua kategori yaitu :

a. Dakwah Secara Bahasa

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab *da'a – yad'u – du'aa – da'watan,* kata dakwah tersebut merupakan isim masdar dari kata da'a yang memiliki arti menyeru, mengajak, mamanggil dan menjamu.

Kata da'a pertama kali dipakai dalam Alquran dengan arti mengadu (meminta pertolongan kepada Allah) yang pelakunya adalah Nabi Nuh As, lalu kata lain ini berarti memohon pertolongan kepada Allah yang pelakunya adalah manusia (dalam arti umum). Setelah itu, kata da'a berarti menyeru kepada Allah yang pelakunya adalah kaum muslimin.[72]

Kemudian kata yad'u, pertama kali dipakai dalam Alquran dengan arti yang mengajak ke Neraka yang pelakunya adalah Setan. Lalu kata itu berarti mengajak ke Surga yang pelakunya adalah Allah, bahkan dalam ayat lain ditemukan bahwa kata

[71] *Ibid.* h. 151.
[72] Asmuni Syukri, *Dasar-Dasar Dan Strategi Dakwah Islam,* (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), h. 104.

yad'u dipakai bersama untuk mengajak ke Neraka yang pelakunya orang-orang musyrik.

Sedangkan kata dakwah sendiri, pertama kali digunakan dalam Alquran dengan arti seruan yang dilakukan oleh para Rasulullah itu tidak berkanan kepada obyeknya. Namun kemudian kata itu berarti panggilan yang juga disertai bentuk fi'il (da'akum) dan kali ini panggilan akan terwujud karena Allah yang memanggil. Lalu kata itu berarti permohonan yang digunakan dalam bentuk do'a kepada Tuhan dan Dia akan menjanjikan akan mengabulkannya.[73]

Prof. DR. Quraish Shihab mendifinisikan dakwah sebagai ;

Seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun maysrakat dan dakwah seharusnya berperan dalam pelaksanaan ajaran Agama Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.[74]

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya dakwah memiliki arti yakni pesan yang datang dari luar, sehingga orientasi dakwah sering pada hal-hal yang bersifat rohani saja.

b. Dakwah Secara Istilah

Dakwah secara istilah adalah mengajak seseorang atau banyak orang untuk memberikan dan mengajarkan serta melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya serta membina hubungan baik antara manusia

[73] Suparta Munzier dan Hefsi Harjai, *"Metode Dakwah"*, (Semesta, Jakarta, 2006), h. 39.
[74] Quraish Shihab, *Membumikan Alquran Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1988), h. 194.

dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan hewan dan hubungan manusia dengan alam semesta.

FPI Kota Palembang membagi dakwah dalam dua pola dakwah yang mana pola ini sesuai dengan AD/ART yang telah disepakati oleh para petinggi DPP FPI pusat.

a. Strategi Dakwah Front Pembela Islam Secara Lisan

Dakwah merupakan suatu proses untuk mengubah suatu situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah SWT yaitu agama Islam. Pada prinsipnya, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan garis aqidah, syariat dan akhlaq Islam.

Adapun strategi dakwah FPI Kota Palembang secara lisan adalah sebagai berikut :

1. Membuka pengajian rutin setiap satu pekan sekali di berbagai tempat yang ada diwilayah Kota Palembang pada khususnya dan wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.
2. FPI di Kota Palembang juga membuat lembaga dakwah yang resmi di bawah naungan FPI. Lembaga dakwah itu diberi nama Majelis Pecinta Islam (MPI), lembaga dakwah ini diresmikan pada tahun 2010 di bawah kepemimpinan Al-habib Umar bin Alwi Assegaf, lembaga ini mengadakan pengajian dari rumah ke rumah, masjid ke masjid dan seterusnya yang diadakan setiap sepekan satu kali tepatnya setiap malam rabu dan terbuka untuk umum.

3. Mengadakan pengajian rutin di markas FPI di Kota Palembang setiap kamis malam terbuka untuk umum.
4. Membuka pelatihan da'I di Kota Palembang yang mana anggotanya bukan hanya kader FPI akan tetapi siapapun yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut.[75]

b. Strategi Dakwah Front Pembela Islam Secara Perbuatan

Dakwah dengan perbuatan adalah bentuk ajakan kepada ajakan kepada Islam dalam bentuk amal dan kerja nyata, baik yang sifatnya seperti mendirikan lembaga pendidikan Islam, kerja bakti, mendirikan bangunan keagamaan, dan lain sebagainya, dakwah dengan perbuatan merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata terhadap penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah.

Selain di bidang dakwah dengan lisan, FPI juga aktif dalam dakwah dengan perbuatan diantaranya :

1. Mengadakan sunatan masal setiap satu tahun sekali secara cuma-cuma.
2. Membina para mualaf baik yang didukung oleh pihak keluarga maupun yang tidak didukung oleh pihak keluarga. Pernah dalam suatu kasus ada seorang mualaf yang ke Islamannya tidak disetujui oleh keluarga tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, mendengar berita ini maka pengurus FPI mengambil alih dalam mengurusi jenazah tersebut sampai selesai.

[75] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi Syahab, sekertaris DPP FPI Kota Palembang pada tanggal 14 September 2014.

3. Menyediakan dua mobil ambulan untuk masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya secara gratis.
4. Membantu melerai suatu bentrokan antar warga baik itu antara muslim dengan muslim maupun antara muslim dengan kafir. Seperti kasus yang terjadi di Mesuji Lampung antara kaum Muslimin dengan kaum Hindu, karena itu umat Hindu sangat tertekan dan ketakutan akan tindakan yang dilakukan oleh kaum muslimin maka beberapa utusan umat Hindu datang ke markas FPI Kota Palembang untuk meminta bantuan kepada FPI agar mereka melindungi harta dan nyawa mereka, maka pengurus dan anggota diutus ke sana untuk melindungi umat Hindu tadi selama tiga bulan lamanya. Dalam waktu ini FPI melakukan mediasi dan membina kaum muslimin di sana agar berdamai.
5. Setiap malam takbiran baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha FPI menggelar pengajian dan pembinaan terhadap para narapidana di Lapas Pakjo dan Lapas Merdeka Kota Palembang.
6. Ikut melakukan bakti sosial yang diadakan oleh pemerintah bila diminta dan melakukan bakti sosial yang diadakan oleh masyarakat sekitar walaupun tidak diminta.
7. Membuka posko-posko untuk para korban yang terkena musibah baik itu kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain-lain yang wilayahnya masuk wilayah Sumatera Selatan.[76]

[76] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi Syahab, Skertaris FPI Kota Palembang, pada tanggal 1 April 2015.

D. Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam Kota Palembang

Amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah dalam tubuh FPI sama penting dan sama-sama harus dijalankan secara bersamaan. Dakwah FPI adalah mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah untuk mencegah orang dari perbuatan maksiat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Secara umum, amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Kurang tepat bila ada yang mengatakan amar ma'ruf lebih penting daripada nahi munkar atau sebaliknya, akan tetapi yang tepat itu keduanya sama penting dan harus sama-sama dilaksanakan.

Semua bentuk dakwah yang dilakukan oleh FPI tidak hanya bersifat *bil lisan*, *bil yad*akan tetapi juga dengan *bil hal* (turun mmimbar). Dengan metode ini diharapkan akan terbentuk masyarakat religius, kalau hanya menegakkan amar ma'ruf saja atau nahi munkar saja atau sebaliknya maka masyarakat relijius tidak akan tercapai.[77]

Dalam istilah fiqh amar ma'ruf nahi mukar biasa disebut dengan istilah (Al-hisbah). Dengan demikian secara sederhana maksud istilah "*amar ma'ruf nahi munkar*" yang telah meng-Indonesia tersebut adalah "*memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran.*"

[77] Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 142.

Ada banyak dalil yang ada dalam Alquran maupun Alhadits yang menjadikan FPI untuk beramar ma'ruf nahi munkar, namun di sini penulis akan memaparkan dalil tersebut cukup satu dari sekian banyak dalil yang ada baik itu dari Alquran dan Al-hadits nya.

1. Dalil Alquran

   Surat Al-imron ayat 104 yang artinya :

   "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

2. Dalil Hadits

   Al-imam Muslim di dalam Al-iman bab tentang nahi munkar bagian dari iman, hadits ke-70 bersumber dari Abu Sa'id Al-khudri, yang artinya :

   "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika dia tidak sanggup maka dengan lisannya, jika ia juga tidak sanggup maka dengan hatinya dan itulah selemah lemahnya keimanan." (HR.Muslim)

Apabila sikap tegas dan keras yang diambil FPI, maka harus ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama; kemunkaran yang ada harus sudah disepakati sebagai sesuatu yang haram, kedua; kemunkaran yang dimaksudkan harus jelas, nyata, terlihat dan harus dibuktikan, ketiga; kemunkaran tersebut tidak bisa lagi

dihadapi dengan jalan dakwah, dan keempat; tindakan tegas dan keras terhadap kemunkaran tidak menimbulkan mudharat yang lebih parah.[78]

Dalam melakukan aksi pemberantasan kemunkaran FPI mendahulukan aspek hukum terlebih dahulu. Apabila apabila aparat yang berwenang tidak lagi peduli dengan aspirasi FPI yang mewakili masyarakat, maka FPI akan berkonsolidasi kepada masyarakat itu untuk bagaimana keinginan masyarakat tersebut dan FPI baru akan bergerak bersama masyarakat atas permintaan mereka.

Ada dua metode yang digunakan FPI dalam *beramar ma'ruf nahi munkar* yang mana telah ditetapkan di dalam AD/ART adalah sebagai berikut :

a. Pengambilan keputusan berdasarkan syariat Islam

Untuk mengambil suatu keputusan apalagi yang berkaitan dengan gerakan fisik amar ma'ruf nahi munkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap sarang maksiat maka FPI harus mengkajinya terlebih dahulu dalam laboratorium syariat.Di sini semua bahan keputusan digodok oleh para ahli secara ilmiah dan professional di bawah naungan Alquran dan Assunnah serta sumber-sumber ijtihad lainnya.

b. Pelaksanaan keputusan dengan menempuh prosedur hukum formal Negara terlebih dahulu.

Dalam rangka menghindari jebakan melawan hukum Negara untuk memelihara kesinambungan perjuangan organisasi, khususnya menyangkut gerakan

[78] Wawancara pribadi dengan Al-Habib Mahdi, Sekretaris FPI Kota Palembang, pada tanggal 1 April 2015.

fisik dalam melawan kemunkaran maka diperlukan prosedur hukum formal, adapun prosedur hukum formal tersebut meliputi :

1. Menghimpun data dan fakta sebagai bukti hukum adanya kemunkaran yang melanggar hukum agama dan hukum negara.
2. Menghimpun dukungan konkrit masyarakat sekitar yang telah diganggu dan dirugikan oleh kemunkaran yang terjadi di wilayah permasalahan.
3. Membuat laporan dan tuntutan keseluruh instansi negara yang berwenang baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sesuai dengan tingkat wilayah permasalahan.
4. Penggunaan dan pemanfaatan kekuatan umat saat prosedur menemui jalan buntu.[79]

Pada saat prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu dan penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* sudah harus dilaksanakan, berbagai pertimbangan telah dilakukan dengan cermat sesuai dengan syariat, maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.

Sehubungan dengan mekanisme perjuangan ini maka FPI membagi wilayah sasaran aksi *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi dua.

[79] Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syahab, *dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Mennjawab Berbagai Tuduhan Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia)*, (Jakarta, Pustaka Ibnu Sidah, Cetakan Kedua, 2008), h. 244.

1. Wilayah aksi *amar ma'ruf*

Wilayah ini adalah wilayah yang padat akan perbuatan maksiat dan didukung oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut tidak merasa terganggu dengan kemaksiatan yang ada diwilayah tersebut.

Wilayah ini FPI tidak boleh melakukan aksi keras melawan maksiat, karena akan menciptakan benturan dengan masyarakat yang memang pada dasarnya belum memiliki kesadaran beragama yang baik. Untuk menghindari konflik horizontal antar FPI dengan masyarakat maka FPI berkewajiban melakukan amar ma'ruf dengan menyemarakkan dakwah di wilayah semacam ini untuk menyadarkan umat dari bahaya maksiat.[80]

2. Wilayah *aksi nahi munkar*

Wilayah ini adalah wilayah yang padat maksiat dan ditolak masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut sudah diresahkan dan diganggu oleh aktivitas kemaksiatan yang ada. Wilayah ini mewajibkan FPI mendorong dan membantu mayarakat secara optimal untuk menindak tegas kemaksiatan yang ada, karena tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat relatif baik, peranan FPI di sini sebagai pelayan umat dalam beramar ma'ruf nahi munkar.

Sehubungan dengan mekanisme perjuangan organisasi, maka FPI memandang perlu untuk menggariskan tertib aksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana yang telah digariskan syariat, yang pelaksanaannya mengutamakan tertib secara berurutan dengan tetap memegang ketentuan mengutamakan kelembutan daripada ketegasan.

[80] *Ibid.* h. 245.

Untuk menjalankan aksi *amar ma'ruf nahi munkar* maka FPI memiliki prosedur yang harus dijalankan oleh seluruh pengurus FPI dari tingkat pusat sampai ketingkat cabang, adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Menutup Tempat Maksiat Tanpa Izin Pemerintah

1. Mengirimkan surat protes dan peringatan keras yang ditujukan kepada pemilik/penguasa tempat tersebut, dengan tembusan yang ditujukan kepada lurah/camat/Kapolsek/Babinsa/Danramil dan ulama setempat sebagai pemberitahuan serta ke MABES LPI sebagai laporan.

2. Bila tidak ditanggapi sekurang-kurangnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan, bila tidak juga ditanggapi maka FPI akan bergerak bersama masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut. Dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan MABES LPI dan aparat pemerintah/keamanan yang berwenang.

b. Prosedur Menutup Tempat Maksiat Yang Memiliki Izin Pemerintah

1. Mengirimkan surat protes dan tuntutan pertama ke lurah dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, Binmas, Babinsa dan ulama setempat serta ke MABES LPI sebagai laporan pemberitahuan.

2. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka akan mengirimkan surat protes dan tuntutan kedua ke camat dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, Kapolsek, Danramil dan ulama setempat serta MABES LPI sebagai laporan dan pemberitahuan dengan melampirkan surat tuntutan pertama.

3. Setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka mengirimkan surat protes dan tuntutan ketiga ke walikota/bupati dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, DRPD tk. II, Kapolres, Dandim dan ulama kotamadya/kabupaten setempat serta MABES LPI sebagai laporan dan pemberitahuan dengan melampirkan surat pertama dan kedua.

4. Apabila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi maka akan mengirimkan surat protes dan tuntutan terakhir (ultimatum) ke gubernur dengan tembusan kepemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, DPRD tk. I, Kapolda, Danrem, Pangdam dan ulama provinsi setempat serta MABES LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan surat pertama, kedua dan ketiga).

5. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi maka baru melibatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut yang dalam pelaksanaannya wajib mengkoordinasikannya dengan LPI dan aparat pemerintahan/keamanan yang berwenang.

c. Prosedur Administratif

1. Setiap surat yang dikirim harus ada tanda terima dan dibuat arsipnya untuk disimpan dengan baik.

2. Setiap surat yang dikirim harus dilampirkan dengan foto copy pernyataan masyarakat setempat tentang ketidaksetujuan mereka dengan keberadaan tempat maksiat tersebut dan dilengkapi dengan tanda tangan mereka sebanyak mungkin dan aslinya tetap harus disimpan sebagai arsip.

3. Setiap surat yang dikirimkan harus dilampirkan dengan bukti adanya kemaksiatan di tempat maksiat tersebut, seperti foto/film tentang transaksi maksiat yang terjadi di dalamnya atau barang bukti lainnya.

4. Setiap surat yang dikirim dianjurkan untuk ditembuskan pula ke pers, baik itu media cetak maupun elektronik untuk kepentingan publikasi dalam pembentukan opini.

5. Selama proses pengiriman surat berlangsung dianjurkan untuk melakukan penggalangan opini anti maksiat lewat tabligh, diskusi, siaran pers, pamphlet, spanduk stiker dan bentuk publikasi lainnya yang disebarluaskan kepada masyarakat setempat, jika perlu digelar aksi demo damai ke tempat maksiat tersebut dan instansi terkait.[81]

d. Prosedur Internal Menutup Tempat Maksiat

1. Ada kesepakatan antara pengurus dan petinggi FPI setempat.

2. Ada restu DPC/DPW FPI setempat.

3. Ada koordinasi dengan MABES LPI setempat.

e. Larangan Dalam Prosedur Standar

1. Dilarang memeras, merampas, menjarah, merusak, membakar, menganiaya dan membunuh.

2. Dilarang mengganggu orang atau pihak manapun yang tidak bersalah.

3. Dilarang melakukan penipuan, penghinaan dan pelecehan serta segala bentuk kemaksiatan.

[81] *Ibid*. h. 250-252.

4. Dilarang melewan aparat secara fisik.

5. Dilarang menggunakan senjata tajam, api dan bahan bakar/bahan peledak.

f. Prosedur Membela Diri

1. Melumpuhkan lawan dengan cara yang paling ringan resikonya.

2. Setelah dilumpuhkan wajib menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.

3. Bila terpaksa sekali maka dengan cara yang paling tegas dank eras, itupun hanya dalam konteks belapaksa/beladiri.

g. Sanksi Pelanggaran Prosedur

Barang siapa dari aktivis Laskar FPI yang dengan sengaja melanggar prosedur tersebut di atas maka akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

1. MABES LPI tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala sepak terjangnya.

2. Sipelanggar akan dikenakan sanksi organisasi yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan kadar kesalahan.

3. Bagi pelanggar pidana maka MABES LPI akan menyerahkannya kepada yang berwenang.[82]

h. Prosedur Menangani Resiko Aksi

1. Bila dalam aksi laskar FPI sesuai dengan prosedur mengakibatkan adanya aktivis laskar FPI yang berurusan dengan aparat penegak hukum, maka MABES LPI berkewajiban melakukan upaya pembelaan hukum secara profesinal, baik dalam hal ligitasi, maupun advokasi.

[82] *Ibid.* h. 253.

2. Bila aktivis laskar FPI tersebut terpaksa harus ditahan/dipenjara sebagai bagian dari resiko perjuangan, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk senantiasa memperhatikan kondisinya serta berkewajiban membantu keluarga yang menjadi tanggungannya selama yang bersangkutan melaksanakan hukuman, teknis pelaksanaan dari semua itu harus diatur oleh MABES LPI.

3. Bila terjadi korba jiwa dari barisan laskar FPI maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk ikut serta dalam mengurus jenazahnya serta membantu secara moril maupun materil bagi keluarga korban dan ikut serta mengirimkan do'a bagi sikorban, MABES LPI wajib mencari tahu pelaku pembunuhan terhadap anggotanya kemudian mengejar, menangkap dan menyerahkannya kepada hukum atau bila terpaksa menindaknya dengan tegas dank eras setimpal dengan perbuatannya dalam konteks belapaksa/beladiri.

4. Bila dalam aksi tersebut menimbulkan kerugian dipihak ketiga yang tidak bersalah dan tidak ada kaitan dengan kemaksiatan yang ada sebagai akses kejadian dilapangan yang terkadang tidak terkendali dan tanpa disengaja, maka MABES LPI berkewajiban meminta maaf serta mengganti rugi kepada pihak yang bersangkutan dan oknum FPI harus bertanggungjawab.

i. Prosedur Memenuhi Permintaan Umat Dalam Menutup Tempat Maksiat

Bila tadi dengan panjang lebar penulis paparkan prosedur standar gerakan anti maksiat bagi laskar FPI, maka di sini penulis perlu paparkan pula prosedur yang harus ditempuh umat dalam meminta bantuan FPI untuk menutup tempat maksiat :

1. Surat permohonan umat yang ditulis secara resmi ditujukan ke FPI.
2. Tanda tangan warga sekitar tempat maksiat yang dikeluhkan sebanyak-banyaknya.
3. Pelaksaan investigasi oleh FPI ke lokasi maksiat untuk menghimpun bukti.
4. Mengikuti prosedur standar gerakan anti maksiat bagi organisasi.[83]

Prosedur standar gerakan amar ma'ruf nahi munkar FPI yang menggiring dan membatasi ruang aksi dalam koridor hukum agama dan hukum negara adalah prosedur yang paling ideal bagi aktivis FPI di manapun mereka berada. Adapun ketentuannya harus dievaluasi, sehingga bisa disempurnkan serta disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan situasi kondisi.

Dari pemaparan di atas tampak jelas bahwa dalam memerangi kemunkaran FPI baik itu tingkat pusat maupun daerah tidak serta merta melakukan aksinya dengan kekerasan. Namun terlebih dahulu menggunakan cara-cara yang lemah lembut sehingga dalam memerangi kemunkaran FPI dibatasi pada kemunkaran yang nyata.

Kegiatan FPI tidak terbatas pada pendekatan aksi dan operasi lapangan yang anarkis, sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak kalangan yang anti Islam sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak kalangan yang anti Islam , tapi juga melakukan kegiatan yang bersifat diplomatis, sosial dan intelektual.[84]

---

[83] *Ibid*. h. 254.

[84] Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 156-157.

Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa semua media-media sekuler di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya bila terjadi suatu kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam baik itu perorangan, ormas maupun partai Islam maka akan ditutup serapat mungkin agar public tidak mengetahuinya, namun bila sedikit saja umat Islam yang melakukan kesalahan maka akan disebarkan oleh berbagai media sekuler diseluruh stasiun media dan diputar berulang-ulang serta dikemas seolah-olah itu adalah ajaran Islam, sehingga menggiring pembaca atau penonton atau pendengar layak untuk menjauhi ajaran Islam dari kehidupan manusia, kecuali apabila ormas atau partai Islam tersebut mau membayar dengan bayaran cukup tinggi maka beritanya pun akan sesuai dengan fakta dilapangan.

Seperti apa yang telah diberitahu oleh seorang pengamat media "Dedi Wahyudi" disaat berdiskusi kepada beberapa awak media sebuah stasiun di Balai Kota Jakarta, berikut ini adalah kutipan dari diskusi mereka :

" Gw mah kawan di XXXRO TV kadang bersimpati dengan apa yang dilakukan para relawan terutama relawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan FPI. " Mereka memang selalu ada di manapun bencana itu terjadi, contoh kebakaran di daerah Jakarta Barat, mereka selalu yang pertama bangun posko kesehatan dan posko bantuan "kita sebagai awak media selalu *gatal* ingin menshot semua angel gambar agar bisa lengkap memberitakan kejadian, TAPI semua itu kaga bisa…" ada aturan dari atasan dan bos pemilik media gw berada, kita sebelum berangkat ke TKP selalu mendapatkan instruksi dari koordinator pemberitaan untuk jangan mengambil gambar dengan angel ada relawan dari partai politik dan FPI koordinator biasa memberi catatan kepada kita, ingat kita nggak jual mereka, jangan pernah ambil gambar ketika mereka beraksi atau apapun juga # catat itu banyak angel gambar ataupun posisi yang bisa kalian cari di TKP, kalo kalian tidak ikuti instruksi ini kalian akan saya kurangi job ke lapangan "kita tidak mau bos besar marah besar" yang namanya gw nyari makan di situ, ya gimana lagi " , pernah ada cerita lucu gw disuruh meliput bencana banjir di Jakarta, TKP gw tu emang tempat di mana banyak relawan PKS ma FPI nya, akhirnya karena inget instruksi kantor kaga boleh diambil gambarnya, gw ampe ngeshot orang-orang di atas rumah aja yang lagi pada nongkrong nunggu bantuan,

kamera gw kagak gw shoot ke banjir ma perahu karetnya karena ada relawan PKS ma FPI “kawan-kawan dalam diskusi, hampir semuanya mengatakan hal yang sama, mendapat instruksi yang sama dan kisah yang sama” mereka kini mengakui punya protap tak tersurat yang mampu mengikat mereka untuk menghilangkan sisi independen dalam jurnalistik yang mereka jalani ada visi politik dan kepentingan yang membatasi mereka menyampaikan hal dan berita dan itu mempengaruhi sisi sebagai seorang jurnalis atau wartawan yang menjunjung kebebasan dalam mendapatkan dan menyampaikan berita, akhirnya media dibuat sebagai tempat mengapresiasikan visi poltik dan kepentingan otak para stakeholdernya”.[85]

Bahkan seorang tokoh Kristen yang benama Jaya Suprana dan juga orang telah mendirikan Museum Rekor Indonesia (MURI) pun merasa kagum pada Imam besar FPI Al-habib Muhammad Rizieq Syihab dengan ormas yang pernah dipimpinnya dan merasa tertipu dengan semua pemberitaan yang pernah diberitakan oleh media sekuler swasta yang ada di Indonesia ini, pernyataan ini adalah wawancara Jaya Suprana di program acaranya yang ditayangkan di stasiun televise TVRI dan telah beredar dijejaraing sosial Youtube terhadap Imam Besar FPI,[86]

Dalam wawancara pribadi penulis dengan dua orang tokoh Muhammdiyah dan ketua LPTQ Sumsel terjadi dua argumen dalam sudut pandang mereka terhadap gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan FPI, adapun argument tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ustad Bahrum Lc, selaku mudir Ma’had Sa’ad Bin Abi Waqqosh Universitas Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

   Kalau aksinya amar ma’ruf nahi munkar kita tidak bisa menjustis FPI melanggar aturan dari berbagai klarifikasi dari media massa, mereka (FPI) mentaati aturan-

[85] Lihat dalamhttp://news.fimadani.com/read/2014/12/18/bos-media-larang-reporter-liput-aksi-relawan-fpi-dan-pks/diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

[86] Lihat dalam https://www.youtube.com/watch?v=Bk7mmZC3fwg diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

aturan izin dulu ke pemerintah setelah berbagai usaha telah dilakukan tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan mereka menindak secara langsung, ini mungkin satu bagian dalam dakwah, banyak mungkin organisasi atau kelompok mendakwahkan Islam dari orang yang tidak menginginkan sehingga banyak hal-hal yang dipersulit. Kalau memang aksinya itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, mereka taat pada aturan ya sah-sah saja, tapi kalau dia anarkis dan tidak taat pada aturan, cara-caranya itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam berdakwah bil-hikmah tadi terutama dakwah dengan bil-hal, Islam tidak mengajarkan beringasan, anarkis tapi bagaimana Islam itu disampaikan dengan lemah lembut, perilaku yang baik, kataatan. Beda halnya ketika Islam dihadapkan dengan kemungkaran dan kebatilan memang iya, bagaimana para sahabat RA dulu dalam memerangi orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam dari aqidah yang tidak benar, ada yang mengaku nabi akhir zaman, hal-hal yang seperti itu posisi Islam memang keras, tapi hal-hal yang lain yang terkait muamalah Islam sangat santun dan Islam sangat mengedepankan kasih saying, dakwah bil-hal dan perilaku akhlak.[87]

2. Ustad Abdullah/Puteh selaku ketua umum LPTQ Sumsel adalah sebagai berikut :

FPI itu dalam menjalankan aksinya mungkin sudah melalui prosedur dalam organisasi dalam berdakwah, kadang-kadang kita ini tidak adil managngga FPI itu adalah organisasi keras, karena kadang-kadang berita itu dalam menyampaikan fakta dipotong-potong, tidak dijelaskan dari awal sampai akhir. Mungkin mereka itu sudah melaporkan dengan aparat hukum dengan segala macamnya, tapi aparat hukum ini mereka bergerak atau tidak, kadang-kadang kekesalan dan kejenuhan oknum-oknum FPI sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan mekanisme yang berlaku karena permintaan mereka (FPI) tidak ditanggapi maka terjadilah insiden-insiden anarkis. Tapi kalau saya lihat FPI itu ideologinya sama dengan LPTQ, tahlilan seperti itu ahlussunnah wal jama'ah, jadi kalau saya pribadi FPI itu saya tidak mau mengatakan FPI itu 100% salah, oke mungkin ada oknum-oknum yang salah dan kita tidak bisa membela oknum-oknum yang salah, pastilah pihak FPI akan menyerahkannya kepada hukum. Kalau pandangan saya kalau dakwahnya mungkin tidak salah, cuma masukanlah untuk FPI itu bisa membungkusnya lebih baik lagi, karena media itukan bukan Islam yang menguasainya, kadang-kadang ada yang menjatuhkan karena tidak senang kepada FPI, makanya kadang-kadang kalau kita mau sangat adil tentang FPI itu kan mereka juga cinta kepada Indonesia, FPI juga dukung yang namanya Pancasila, tidak ada yang namanya Pancasila itu yang bertentangan dengan Alquran. Ketika kemerdekaan Indonesia itu mereka dukung, ketika terjadi bencana-bencana mereka turun untuk membantu, Cuma kadang-kadang media lagi yang tidan mengespos itu akan tetapi media hanya mengekspos kejadian-

[87] Wawancara pribadi dengan Ust. Bahrum Lc, pada tanggal 17-9-2015.

kejadian yang anarkis dan jelek-jeleknya saja, namun kronologisnya mereka tidak tahu.[88]

Terlepas dari persepsi positif maupun negative public terhadap gerakan yang telah dilakukan oleh FPI yang ikut berpartisipasi dalam merespon segala bentuk kemungkaran di negeri ini, FPI pun berperan sebagai kontrol sosial yang sangat kritis di dalam menjalankan aksi-aksinya.

[88] Wawancara pribadi dengan Ust. Abdullah/Puteh, pada tanggal 25-8-2015.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Front Pembela Islam adalah organisasi masyarakat Islam yang independen dan berideologikan *amar ma'ruf munkar*, FPI bukan organisasi politik ataupun organisasi sosial politik, disebut Front karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih pada tindakan konkrit berupa aksi frontal yang nyata dan terang dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka dari itu FPI tidak pernah bertindak secara diam-diam. Disebut Pembela dengan harapan agar senantiasa bersikap proaktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadila dan kata Islam menunjukkan bahwa perjuangn FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar lagi mulia.

Pendirian organisasi ini hanya jeda waktu empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di setiap aspek kehidupan.

FPI Kota Palembang didirikan hanya jeda waktu tiga bulan dari berdirinya FPI pusat, tepatnya adalah tanggal 17 November 1998, FPI Kota Palembang adalah cabang yang pertama kali didirikan di Indonesia. Menyangkut ideologi, visi-misi dan lain sebagainya FPI Kota Palembang adalah sama dengan yang ada di pusat.

Markas FPI Kota Palembang sudah berpindah tempat dua kali yang pertama adalah di belakang Pasar Kuto, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilit Timur I lalu setelah jeda waktu lima bulan maka markas dipindahkan ke Jl. Dr. M Isa, lorong Gubah, Kel. Kuto Batu, Kec. Ilir Timur I dan markas yang kedua ini yang bertahan hingga sekarang.

FPI di dalam menjalankan visi dan misinya menempuh dua jalan yaitu jalan dakwah dan jalan *amar ma'ruf nahi munkar*, adapun jalan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Gerakan dakwah FPI di Kota Palembang

Dakwah FPI terbagi menjadi dua yaitu, dakwah secara lisan dan perbuatan yaitu sebagai berikut :

1. Dakwah secara lisan yang dilakukan adalah seperti membuka pengajian rutin setiap satu pecan sekali diberbagai tempat khususnya di Kota Palembang dan di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Selatan. Majelis Pecinta Islam (MPI) adalah lembaga dakwah FPI yang secara resmi dibentuk pada tahun 2010 dan merupakan anak organisasi yang bergerak dibidang dakwah. Selain dari MPI ormas ini juga membuka pelatihan da'i yang siapa saja boleh ikut selagi dia muslim.
2. Dakwah secara perbuatan yang dijalankan adalah seperti mengadakan sunatan massal secara gratis, membina para mualaf baik yang didukung oleh keluarganya ataupun yang tidak, menyediakan ambulan untuk masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya secara gratis,

membantu meleraikan pertikaian antar warga, membuka pengajian dan pembinaan spiritual para napi lapas Pakjo dan lapas Merdeka Kota Palembang, melakukan bakti sosial abaik itu yang diminta oleh pemerintah setempat maupun yang tidak, membuka posko-posko untuk para korban yang tertimpa musibah seperti kebakaran, banjir, longsor dan lainnya di wilayah manapun yang mencakup wilayah Sumsel.

b. *Amar ma'ruf nahi munkar* FPI di Kota Palembang

Dalam istilah di dalam ilmu fiqh *amar ma'ruf nahi munkar* biasa disebut dengan istilah (Al-Hisbah) yang artinya *memerintahkan kebajikan dan mencegah keburukan*.

1. *Amar ma'ruf* yang dilakukan FPI adalah seperti membuka majelis zikir, mengadakan istighozah, membuka majelis ta'lim, membina aktivis, membuka pelatihan dakwah, menyantuni fakir miskin dan juga sering mengadakan tabligh akbar untuk menyatukan dari semua jenis umat Islam.
2. *Nahi munkar* yang dilakukan FPI adalah seperti menutup tempat perjudian, menutup tempat pelacuran, merazia tempat orang meminum minuman keras, mencegah tumbuh dan berkembangnya aliran sesat seperti, ahmadiyah, liberalisme, dan lain-lain, serta seluruh hal-hal yang buruk lainnya baik itu dalam tubuh aktivis dan juga yang ada di luar organisasi apakah itu individu maupun secara berkelompok maka FPI terpanggil dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan semua kemaksiatan tersebut.

B. Saran

Dengan semakin majunya teknologi yang ada di dunia ini pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya maka FPI butuh persiapan yang cukup kuat disegala bidang, terutama agama. Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam berdakwah di era ini, salah satu alternatifnya adalah menguatkan dakwah Islam baik dari segi materi, pesan yang disampaikan maupun dari segi motode yang digunakan.

Dakwah Islam tidak boleh hanya menyentuh kulit-kulit ajaran Islam semata, tetapi juga masuk ke inti dan esensi ajarannya. Karena ajaran Islam bersifat komprehensif, maka dakwah Islam pun haruslah bersifat komprehensif. Pemahaman dan penerapan Islam secara parsial menyebabkan kekuatan agama ini tidak kelihatan bahkan tidak efektif. Untuk itu, metode dakwah harus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman.

Selain persiapan yang matang dalam melakukan aktivitas berdakwah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga harus dimanfaatkan oleh FPI dengan sebaik-baiknya mengingat media teknologi dan komunikasi merupakan salah satu saluran penyampaian pesan yang sangat efektif.

Untuk mendukung gerakan dakwahnya, FPI harus bisa membangun hubungan relasional yang baik dengan media massa (sinergis), baik cetak maupun elektronik. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi pemberitaan yang miring dan timpang terhadap aksi FPI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di lapangan. Jika mereka bisa bersinergis dengan media massa, maka pesan dakwah FPI untuk

menanggulangi dampak negatif modernisasi dapat menyentuh saudara kita yang berada diberbagai daerah.

Pada zaman ini, seorang da'i harus melek terhadap media (media literacy). Karena dakwah merupakan komunikasi keagamaan akan dihadapkan kepada perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih, sebab itu, kita (umat Islam) memerlukan adaptasi terhadap kemajuan tersebut agar tidak tertinggal dengan barat yang selalu menggunakan media massa sebagai alat untuk melakukan penetrasi budaya mereka, yang pada hakikatnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Al-habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, Dialog Front Pembela Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat Di Indonesia, (Jakarta: Ibnu Sidah, 2008).

Al-habib Muhammad Rizieq Syihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah, (Jakarta, Suara Islam Perss, 2013).

Arsip FPI Kota Palembang.

Asmuni Syukri, Dasar-Dasar Dan Strategi Dakwah Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983).

BPS, Statistik Daerah Kota Palembang 2010.

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2011).

Endang Rochmiatun, Filsafat Sejarah, (Yokyakarta: idea Press, 2011).

Fakultas Adab dan Humaniora, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, h.19.

Ida Bagus Irawan, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradikma: Fakta Sosial, Definisi sosial Dan Perilaku Sosia,l (Kencana Prenada Media Grup, 2012).

Imam Tholkhah dan Neng Dara Affiah, Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru Upaya Merambah Dimensi Baru Islam, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI).

Jamhari, Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2004).

Khamami Zada, Islam Radikal, (Jakarta, PT Teraju, 2002).

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1985).

Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius,2005).

Muhammad Syawaluddin, Resume Teori-teori Sosiologi,(Program Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 2009).

Mohammad Syawaludin, Memahami Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Konflik Lewis A. Coser, dalam Tamaddun Jurnal Sastra dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, No. 1/ Vol. XI (Januari-Juni 2011).

Mujiburrahman, Menakar Fundamentalisme Islam, (Jakarta ; Afkar, 2002) .

Quraish Shihab, membumikan Alquran Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung : Mizan, 1988).

Retno Purwanti, Perubahan Pola Pemukiman Masyarakat Palembang Dalam Perspektif Arkeo-Ekologi, Dalam Tamaddun, Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam, no.2, vol. 4, (Palembang : Fakultas Adab Dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah, 2004).

Sumardi Suryarata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Suparta Munzier dan Hefsi Harjai, “Metode Dakwah”, (PT Semesta, Jakarta, 2006).

Syahrul Efendi D, Habib FPI Gempur Playboy, (Jakarta : Yudi Pramoko, Rajanya Penerbit Islam Divisi Dakwah Dan Bisnis, 2006).

Syamsul Munir Amin, M.A, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Amzah. 2010).

WEBSITE

http://tujuhkoto.wordpress.com.
2014 http://darniahbongas.Wordpress.com

http://www.risalahislam.com/2014/03/pengertian-dan-metode-dakwah-islam.html.

http://www.yajri.or.id/news/opini/fpi-anarkis-benarkah-mengapa/

https://banjirembun.blogspot.com/2014/06/03organisasi-keagamaan-indonesia-studi.html

http://news.fimadani.com/read/2014/12/18/bos-media-larang-reporter-liput-aksi-relawan-fpi-dan-pks/

https://www.youtube.com/watch?v=Bk7mmZC3fwg

palembangkota.bps.go.id

Palembangkota.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/statistik-daerah-kotapalembang-Tahun-2015.pdf.

WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan Al-habib Mahdi, sekertaris FPI kota Palembang.

Wawancara pribadi dengan Gunawan, warga kelurahan Kuto Batu.

Wawancara pribadi dengan Ust. Bahrum Lc.

Wawancara pribadi dengan Ust. Abdullah/Puteh.